

PENGARUH *FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)*, *LABOR FORCE PARTICIPATION RATE (LFPR)* DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN 2002-2024

(Skripsi)

Disusun Oleh:

SURNITA

1911021056



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PENGARUH *FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)*, *LABOR FORCE PARTICIPATION RATE (LFPR)* DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN 2002-2024

OLEH :

SURNITA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Foreign Direct Investment (FDI)*, *Labor Force Participation Rate (LFPR)*, *Government Effectiveness*, dan *Control of Corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama periode 2002–2024. Latar belakang penelitian didasarkan pada adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup 10 negara anggota ASEAN dengan periode observasi tahun 2002–2024. Variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independennya meliputi *FDI*, *LFPR*, *Government Effectiveness*, dan *Control of Corruption*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *FDI*, *LFPR*, *Government Effectiveness*, dan *Control of Corruption* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. *FDI* berperan sebagai sumber akumulasi modal dan transfer teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. *LFPR* mencerminkan pemanfaatan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan output. Sementara itu, kualitas tata kelola pemerintahan yang tercermin melalui *Government Effectiveness* dan *Control of Corruption* mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperkuat kepercayaan investor. Secara simultan, keempat variabel tersebut menjadi faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Kata Kunci: *Foreign Direct Investment (FDI)*, *Labor Force Participation Rate (LFPR)*, *Government Effectiveness*, *Control of Corruption*, Pertumbuhan Ekonomi, ASEAN.

ABSTRACT

THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), LABOR FORCE PARTICIPATION RATE (LFPR), AND GOVERNANCE ON ECONOMIC GROWTH IN ASEAN, 2002–2024

**BY:
SURNITA**

This study aims to analyze the effects of Foreign Direct Investment (FDI), Labor Force Participation Rate (LFPR), Government Effectiveness, and Control of Corruption on economic growth in ASEAN countries during the period 2002–2024. The study is motivated by the differences in economic growth rates among ASEAN member countries. This research employs panel data covering ten ASEAN member states over the observation period of 2002–2024. Economic growth is used as the dependent variable, while FDI, LFPR, Government Effectiveness, and Control of Corruption serve as the independent variables.

The results indicate that FDI, LFPR, Government Effectiveness, and Control of Corruption influence economic growth in ASEAN countries. FDI plays an important role as a source of capital accumulation and technology transfer that can enhance economic productivity. LFPR reflects labor force participation in economic activities, which contributes to increased economic output. Meanwhile, the quality of governance, as reflected by Government Effectiveness and Control of Corruption, is capable of creating a more conducive economic environment, improving bureaucratic efficiency, and strengthening investor confidence. Simultaneously, these four variables are important determinants of economic growth in ASEAN.

Keywords: *Foreign Direct Investment (FDI), Labor Force Participation Rate (LFPR), Government Effectiveness, Control of Corruption, Economic Growth, ASEAN.*

PENGARUH *FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)*, *LABOR FORCE PARTICIPATION RATE (LFPR)* DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN 2002-2024

Oleh

Surnita

1911021056

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), LABOR FORCE PARTICIPATION RATE (LFPR) DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN 2002-2024**

Nama Mahasiswa Nomor : **Surnita**

Pokok Mahasiswa Jurusan : **1911021056**

Fakultas : **Ekonomi**

Pembangunan : **Ekonomi dan Bisnis**



Komisi Pembimbing

Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.
NIP 198007052006042002

MENGETAHUI

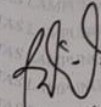
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.
NIP 198007052006042002

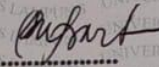
MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.



Penguji 1 : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si

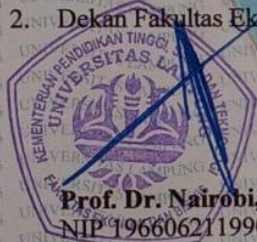


Penguji 2 : Prayudha Ananta, S.E., M.Si



2. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Surnita
NPM : 1911021056
Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), LABOR FORCE PARTICIPATION RATE (LFPR) DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN 2002-2024**" merupakan hasil karya saya sendiri. Skripsi ini telah saya kerjakan dengan serius dan bukan hasil penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah atau yang disebut Plagiarisme. Jika dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Juni 2026



3000
METERAI
TEMPEL
B64BAAOX016532775

Penulis

Surnita
NPM. 1911021056

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Surnita yang dilahirkan di Suoh pada tanggal 14 Juli 2000, anak Pertama dari pasangan Bapak Sabaruddin dan Ibu Juairiyah. Pada tahun 2006, penulis mengawali pendidikan formal di SD Kandang Besi, Kec. Kotaagung barat, Kab. Tanggamus dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di MTs Al-Ma'mur Banjarsari Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis meneruskan pendidikan pada tahun yang sama di MAN 1 Tanggamus, Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dan lulus pada tahun 2018.

Di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa di kampus tersebut, penulis telah mengikuti berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, seperti BEM-U KBM UNILA (2019), dan Ketua bidang alat MAHEPEL FEB UNILA Tahun 2022.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS.Al-Baqarah 2:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan),tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap”

(QS Al-insyirah : 6-7)

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,jangan mengecewakan mereka,simpan keluh mu sebab letih mu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

“kita harus berarti untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain ”

(Ralph Waldo Emerson)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Penulis persembahkan karya terbaik ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, terhormat, tersayang sebagai panutan dalam hidup.

Bapak **Huzaimi** dan Ibu **Juairiyah**

Terima kasih telah membesarkan dan membimbing dengan penuh kasih sayang, selalu memotivasi dan memberikan dukungan moril maupun materi, selalu mendoakan kesuksesan penulis, serta segala bentuk pengorbanan dalam semua hal yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan pernah bisa terbalas. Semoga Allah selalu melindungi kalian semua.

Kaka Dan Adikku **M. Savik, M.Andri, Dan Yuliya Putri**

Terima kasih selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan yang tak hentinya memberikan doa dan dukungannya.

Para dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis

Dan tak lupa almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik, skripsi yang berjudul “Pengaruh *Foreign Direct Investment (FDI)*, *Labor Force Partipation Rate (LFPR)* Dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 2002-2024 ” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis memperoleh bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi, sehingga atas kesempatan serta kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr.Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan ikhlas sekaligus memberikan motivasi serta arahnya yang berharga bagi penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. I Wayan suparta, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas pada seminar proposal serta seminar hasil dan Penguji yang telah memberikan waktu, arahan, saran, dan motivasi dukungan dan tambahan ilmu dengan penuh ketelitian agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Prayudha Ananta, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas seminar hasil dan penguji yang telah memberikan waktu, arahan, saran motivasi dukungan dan tambahan ilmu dengan penuh ketelitian agar skripsi ini dapat selesai

dengan baik.

6. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing dan memberikan dukungan serta arahan terbaik untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu semasa perkuliahan, serta seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bantuan dari pelayanan untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teruntuk Bapak Saya Huzaimi Beliau memang tidak bergelar sarjana namun beliau mendidik penulis dengan sepenuh hati, memberikan semangat yang tiada hentinya, memberikan kasih sayang, doa, motivasi dengan penuh keikhlasan untukku serta tenaga yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih untuk semua hal yang Abah telah berikan, hal itu tak akan pernah bisa ku balas sepanjang masa. Abah adalah alasan terkuatku untuk menyelesaikan skripsi ini. Kebahagiaan dan rasa bangga Abah menjadi tujuan utama dalam hidupku. Terimakasih banyak bah, dirimu sangat berarti bagiku.
9. Pintu surgaku, Ibu Juairiah Ibuku tercinta, terima kasih sebesar- besarnya diriku berikan kepada mu yang senantiasa mendoakan setiap langkahku untuk selalu semangat serta memberikan bentuk bantuan dan nasihat yang selalu diberikan meski pikiran kita terkadang tak sejalan. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi diriku yang keras kepala. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat selama hidupku. terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang. Semoga ini adalah langkah awal, diriku untuk terus membanggakan Mama dan Papa
10. Untuk Abang dan adikku ku tersayang Aa Savik, Andri, dan Yuliya Putri. Terima kasih karena selalu membantu menjadi penyemangat serta memberikan motivasi, mendukung, dan mendoakanku.
11. Terima kasih Kakak bibi ku yang Agung maini karena telah membantu, mendukung, dan mendoakanku.

12. Sepupuku Aril, Naysila Atika, Sophia, Bilqish, Qonita, Dan Feni, terima kasih sudah membantuku saat mengerjakan skripsi. Terima kasih paman dan tante ku Pakbalak Al-khoyat, dan Makbalak Rohida terima kasih atas doa kalian semua maupun dukungan bantuan dan kasih sayang serta menjadi sumber semangat untuk tetap hidup dan berjuang,
13. Ponakan ku tersayang Rayhan anak kecil yang selalu menjadi teman untuk ku tantenya mengobati rasa lelah terima kasih sudah lahir dan hadir disaat tante menulis skripsi ini menjadi sumber penyemangat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kakek dan Nenekku tersayang, Alm Jahidi, Alm Nuryati, Alm Syirat dan Alm Sumiyah, terima kasih atas doa dan dukungannya.
15. Kekasihku satu-satunya Dedi Pratama, terimakasih karna memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu bersedia memberikan yang dibutuhkan dan terimakasih karna sudah hadir ketika penulis sedang mengerjakan skripsi, sehingga penulis tidak pernah merasa sendiri.
16. Sahabat seperjuanganku Anggarini dan Grahito satria anggara terimakasih atas kebersamaannya selama saat menempuh semasa perkuliahan dan meluangkan waktu di sela- sela kesibukan beliau membantu penulis mengarahkan revisian, saling memberikan semangat selalu. Semoga Allah menggantikan berkali-kali lipat kesuksesan untuk kita kedepannya Aamiin.
17. Teman-teman semasa perkuliahan Wini Aryanti, Sabila Ramadhani, Ninengah Rizki Noventy, Lady Luciana, Diah, Vania, Intan, Shantika, , Sopia, Wanda, , Razaka, Deffa, Rizky, Andika, Farel, Royyan, Kak Saefudin, terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangatnya serta kebersamaannya selama menempuh perkuliahan dan terima kasih telah mendengarkan kebahagiaan serta keluh kesah sesama kuliah
18. teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih dukungan serta segala pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
19. Kucing kesayanganku satu-satunya yang hadir di detik-detik penulis

mengerjakan skripsi ini Morphy Degula. Terimakasih karna sudah menemani dan menghibur ditengah malam sehingga penulis tidak merasa jenuh dan kesepian. Tingkah manjanya yang selalu ditunjukkan membuat penulis merasa lebih tenang dan bahagia sehingga dapat mengerjakan skripsi dengan lebih bersemangat.

20. Dan yang terakhir, kepada diriku sendiri, Surnita, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap segala prosesnya yang bisa dibbilang tidak mudah. Meski sering putus asa dengan apa yang sedang dicoba. Tetaplah menjadi manusia yang selalu ingin mencoba, berbahagialah dimana pun kamu berada, selalu rayakan kehadiranmu di dunia ini tentang segala hal yang membuatmu tetap hidup, pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal-hal baik di alam semesta dan terima kasih karena selalu melibatkan Allah SWT dalam setiap perjuangan dan mengizinkan Allah untuk menjadi batu sandaran, apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan sendiri.
21. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik ini untuk pengembangan lebih lanjut sangatlah diharapkan penulis. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada penulis dari Allah SWT berlipat ganda. Aamiin.

Bandar Lampung, 12 Juni 2026



Surnita
1911021056

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Foreign Direct Investment (FDI)*, *Labor Force Participation Rate (LFPR)*, dan Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN Tahun 2002–2024”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, kedua orang tua, keluarga, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2026

Penulis,



Surnita
NPM.1911021056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.1.1 Fenomena Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	14
1.1.2 Kesenjangan Empiris Penelitian	15
1.1.3 Alasan Pemilihan Periode 2002–2024	15
1.1.4 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa aspek sebagai berikut:	16
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan Teoritis	19
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	19
2.1.2 Foreign Direct Investment (FDI)	24
2.1.3 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (<i>Labor Force Partipation Rate /LFPR</i>)	30
2.1.4 Tata Kelola Pemerintahan	32
2.2 Tinjauan Empiris	39
2.3 Kerangka Pemikiran	40
2.4 Hipotesis	40

III. METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	41
3.1.1 Jenis Penelitian	41
3.1.1 Sumber Data	41
3.2 Definisi Operasional Variabel	41
3.3 Model Penelitian.....	44
3.4 Metode Analisis Data.....	44
3.4.1 Metode Regresi Panel Data.....	44
3.5 Tahap Analisis	45
3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik.....	45
3.5.2 Metode Estimasi Regresi Data Panel.....	48
3.5.3 Uji Spesifikasi Model.....	50
3.5.3.1 Uji Chow	50
3.5.3.2 Uji Hausman	50
3.5.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM).....	51
3.5.4 Pengujian Hipotesis Statistik	51
3.5.4.1 Uji Signifikansi Individu (Uji t)	52
3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F).....	53
3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R ²)	53
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.2 Statistik Deskriptif.....	54
4.3 Uji Asumsi Klasik	57
4.4 Analisis Regresi Data Panel	59
4.5 Regresi Data Panel.....	61
4.6 Uji Hipotesis.....	63
4.6.1 Uji t.....	63
4.6.2 Uji F.....	65
4.7 Individual Effect.....	68
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi 10 Negara ASEAN 2002-2024 (%)	5
Gambar 2. <i>FDI</i> di 10 Negara ASEAN tahun 2002-2024 (%)	7
Gambar 3. <i>LFPR</i> di Negara ASEAN tahun 2002-2024 (%).....	10
Gambar 4. <i>GE</i> di 10 Negara Anggota ASEAN Tahun 2002-2024 (indeks)	12
Gambar 5. <i>CC</i> di 10 Negara Anggota ASEAN 2002-2024 (indeks)	14
gambar 6. Kerangka Pemikiran.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif	55
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas.....	57
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas (Korelasi Antar Variabel Independen)	58
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas (White Test)	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	59
Tabel 4. 6 Hasil Uji Chow.....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman	60
Tabel 4.8 Hasil Regresi Data Panel	61
Tabel 4.9 Hasil Uji t (Fixed Effect Model).....	64
Tabel 4.10 Hasil Uji F (Fixed Effect Model).....	66
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi	67
Tabel 4.12 Individual Effect (Fixed Effect Model).....	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perbaikan tingkat kesejahteraan. Dalam era globalisasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya ditentukan oleh faktor domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh integrasi ekonomi internasional, arus investasi asing, dinamika pasar tenaga kerja, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, negara-negara berkembang dituntut mampu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC), negara-negara anggota ASEAN semakin terintegrasi dalam perdagangan internasional, investasi, dan mobilitas faktor produksi. Integrasi tersebut telah memberikan peluang besar bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurut data ASEAN Secretariat, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN mencapai lebih dari USD 3,8 triliun pada tahun 2024 dan menjadikan ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. ASEAN juga diproyeksikan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif sekitar 4,5% hingga 4,8% pada tahun 2024–2025 meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN selama periode 2002–2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Beberapa negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sedangkan negara lain mengalami perlambatan akibat berbagai

guncangan ekonomi global, termasuk krisis keuangan global tahun 2008, perlambatan perdagangan internasional, pandemi COVID-19, dan ketegangan geopolitik dunia. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi masing-masing negara ASEAN. Di samping *FDI* dan *LFPR*, faktor kelembagaan atau tata kelola pemerintahan juga semakin mendapat perhatian dalam literatur pembangunan ekonomi modern. Teori kelembagaan yang dikembangkan oleh North menegaskan bahwa kualitas institusi merupakan faktor fundamental yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas birokrasi, mengurangi biaya transaksi, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap suatu Negara (North, 1990; Acemoglu & Robinson, 2012).

World Bank melalui *Worldwide Governance Indicators (WGI)* mengukur kualitas tata kelola pemerintahan melalui enam dimensi utama, yaitu :

1. *Government effectiveness*
2. *Regulatory Quality*
3. *Rule of Law,*
4. *Control of Corruption*
5. *Political Stability,*
6. *Voice and Accountability.*

Dari berbagai dimensi tersebut, *Government effectiveness* dan *Control of Corruption* sering digunakan sebagai indikator utama karena mencerminkan kualitas pelayanan publik, kapasitas birokrasi, independensi aparatur pemerintah, dan efektivitas implementasi kebijakan publik. Negara dengan tata kelola yang baik cenderung lebih mampu menarik investasi asing, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mengalokasikan sumber daya ekonomi secara lebih efisien. Sebaliknya, lemahnya tata kelola pemerintahan dapat menghambat aktivitas ekonomi melalui tingginya tingkat korupsi, ketidakpastian regulasi, dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

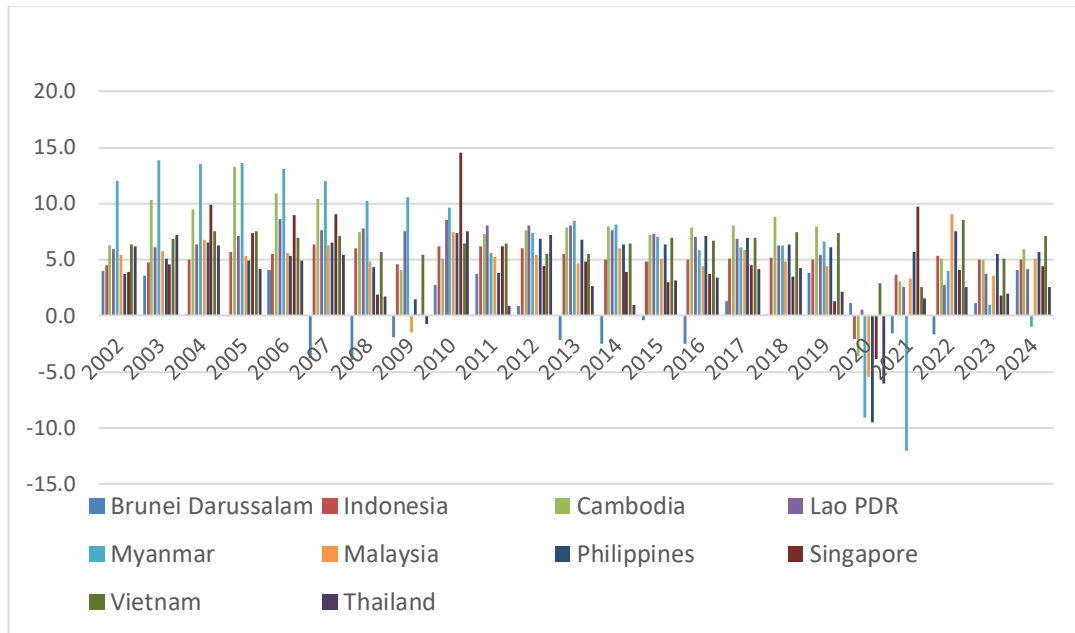
Berbagai penelitian empiris telah membuktikan pentingnya *FDI* dan kualitas tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Kharisma (2025) menemukan bahwa *FDI* dan kualitas institusi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas institusi yang baik mampu meningkatkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari investasi asing. Temuan serupa juga diperoleh oleh penelitian mengenai kualitas institusi dan *FDI* di ASEAN yang menunjukkan bahwa indikator *Government effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Control of Corruption*, dan *Voice and Accountability* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Selain itu, *FDI* juga terbukti menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi, beberapa penelitian menemukan bahwa *FDI* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian lain menemukan pengaruh yang lemah atau bahkan tidak signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *FDI* dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dapat dijelaskan secara komprehensif. Kondisi serupa juga terjadi pada variabel *LFPR* dan tata kelola pemerintahan yang masih menghasilkan temuan empiris yang beragam. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada hubungan antara *FDI* dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan peran tenaga kerja dan kualitas tata kelola pemerintahan secara simultan.

Penelitian terdahulu juga masih banyak yang menggunakan periode observasi yang relatif pendek, seperti 2010–2020 atau 2011–2020, sehingga belum mampu menggambarkan perubahan struktural ekonomi ASEAN dalam jangka panjang. Keterbatasan lainnya adalah penggunaan indikator kelembagaan yang belum spesifik serta cakupan negara yang terbatas. Sebagian penelitian hanya menggunakan beberapa negara ASEAN atau menggabungkan negara ASEAN dengan kawasan lain sehingga hasilnya kurang merepresentasikan kondisi ASEAN secara keseluruhan. Berdasarkan kajian empiris tersebut, terdapat

kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, masih terbatas penelitian yang menganalisis pengaruh *FDI*, *LFPR*, dan tata kelola pemerintahan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Kedua, penelitian dengan periode panjang 2002–2024 masih relatif sedikit dilakukan. Ketiga, dinamika ekonomi pascapandemi COVID-19 serta perubahan arus investasi global belum banyak diakomodasi dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ekonomi pembangunan dengan mengintegrasikan faktor investasi asing, partisipasi angkatan kerja, dan tata kelola pemerintahan dalam satu model analisis panel data negara-negara ASEAN selama periode 2002–2024. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris terbaru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi ASEAN pada era integrasi ekonomi dan transformasi digital.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami faktor-faktor utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan ASEAN. Penelitian ini memerlukan bukti empiris yang komprehensif untuk menjelaskan hubungan antara *FDI*, *LFPR*, tata kelola pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN di tengah meningkatnya persaingan investasi global, perubahan struktur pasar tenaga kerja, serta tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara ASEAN. Anggota ASEAN terdiri atas sepuluh negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Berikut ini adalah data pertumbuhan Negara anggota ASEAN yang di peroleh dari *word bank* dan sudah di digambarkan dalam bentuk tabel sehingga dapat lebih mudah untuk dibandingkan dan dipahami. Pertumbuhan ekonomi 10 anggota ASEAN dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Sumber: World Bank 2026 (diolah)

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi 10 Negara ASEAN 2002-2024 (%)

Berdasarkan Gambar 1. terdapat beberapa kondisi yang menonjol dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN selama periode 2002–2024. Dari sisi positif, Kamboja menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu 7,11% sedangkan Brunei Darussalam menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu 0,45%. Selain itu, Vietnam dan Myanmar juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil selama periode penelitian, didukung oleh perkembangan sektor industri, ekspor, dan masuknya investasi asing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa negara ASEAN memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika perekonomian global.

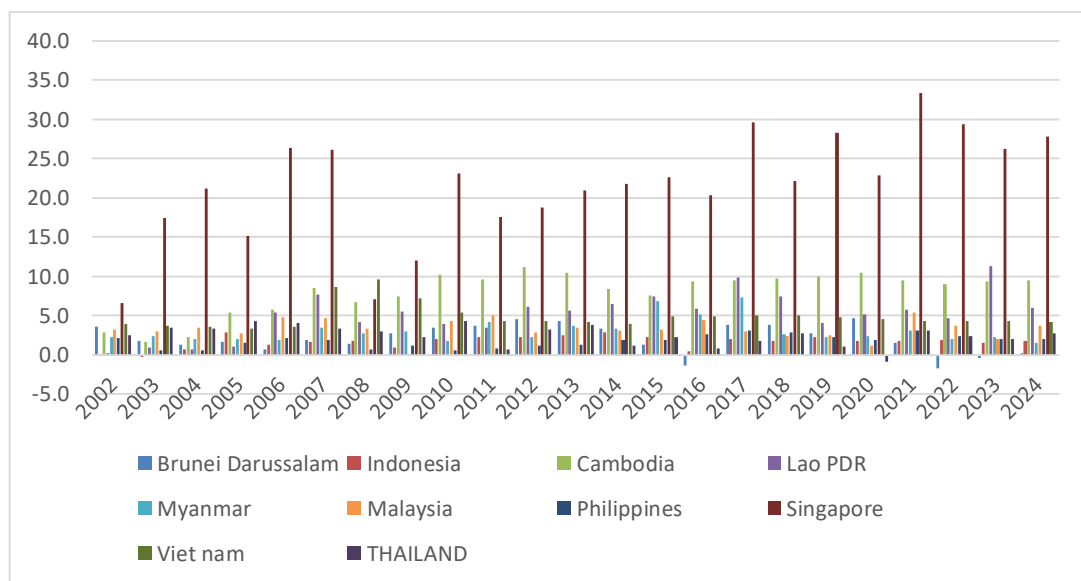
Rata-rata Pertumbuhan ekonomi paling baik terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 7,41% sedangkan berkontraksi paling dalam terjadi pada tahun 2020 ketika sebagian besar negara ASEAN mengalami perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Thailand, Filipina, dan Singapura mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu -9,51%. Penurunan tersebut disebabkan oleh terganggunya aktivitas produksi, perdagangan internasional, pariwisata, serta mobilitas masyarakat yang berdampak pada menurunnya

permintaan dan investasi. Meskipun demikian, pada periode 2021–2024 sebagian besar negara ASEAN mulai menunjukkan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan kembali meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi setelah pandemi mereda.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara cenderung dapat dicapai secara optimal apabila didukung oleh kebijakan investasi yang efektif, baik yang berasal dari sumber domestik maupun dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing langsung (*FDI*). *Foreign Direct Investment (FDI)* sendiri merupakan aliran modal internasional yang terjadi ketika perusahaan dari suatu negara melakukan pendirian maupun ekspansi usaha di negara lain (Krugman, 1999). *FDI* juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang dilakukan investor asing dalam suatu negara dengan tujuan memperoleh pengendalian atau pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang di investasikan. Kehadiran *FDI* pada suatu Negara tidak hanya menyediakan tambahan modal bagi perekonomian, tetapi juga membawa transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, inovasi manajemen, serta perluasan akses pasar internasional.

FDI merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang penting bagi negara berkembang dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi (World Bank, 2024). *ASEAN Investment Report 2024* menunjukkan bahwa kawasan ASEAN tetap menjadi salah satu tujuan investasi asing paling menarik di dunia. Bahkan ketika aliran investasi global mengalami penurunan, ASEAN masih mampu mempertahankan arus masuk *FDI* dalam jumlah besar. ASEAN berhasil menarik investasi asing lebih dari USD 220 miliar pada tahun 2024 dan mempertahankan posisinya sebagai kawasan penerima *FDI* terbesar di antara negara-negara berkembang selama beberapa tahun terakhir (ASEAN Secretariat & UNCTAD, 2024). Meskipun demikian, tingginya arus masuk *FDI* tidak selalu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama pada setiap negara ASEAN. Beberapa negara dengan tingkat *FDI* tinggi mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sedangkan negara lain tidak memperoleh dampak yang optimal.

Foreign direct investment (FDI) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang berdasarkan hasil penelitian Hoang, Wiboonchutikula, dan Tubtintong (2010). Peningkatan investasi asing langsung dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi domestik (Azman-Saini, Law, & Ahmad, 2010). Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh *FDI* terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yaitu periode 2002-2024. Perkembangan *FDI* di negara ASEAN dapat dilihat pada Gambar dibawah :



Sumber: World Bank, 2026 (diolah)

Gambar 2. *FDI* di 10 Negara ASEAN tahun 2002-2024 (%)

Foreign Direct Investment (FDI) pada Gambar 2. di Sepuluh negara ASEAN menunjukkan nilai rata-rata yang berfluktuatif dari tahun 2002-2024. Nilai rata-rata *FDI* tertinggi tercatat pada negara Singapura yaitu sebesar 21,6%, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada Indonesia yaitu sebesar 1,69%. Masuknya investasi asing langsung atau *FDI* mendorong terjadinya transfer sumber daya berupa modal, teknologi, serta pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang, proses alih sumber daya tersebut berperan dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan output nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Lamsiraroj, 2015).

Tenaga kerja juga merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan output ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau *Labor Force Participation Rate (LFPR)* menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Negara-negara ASEAN menghadapi tantangan yang berbeda dalam pengelolaan pasar tenaga kerja. Beberapa negara mengalami bonus demografi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Namun demikian, peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masih terdapat berbagai permasalahan seperti kesenjangan keterampilan, produktivitas tenaga kerja yang rendah, dominasi sektor informal, dan ketimpangan partisipasi tenaga kerja berdasarkan gender.

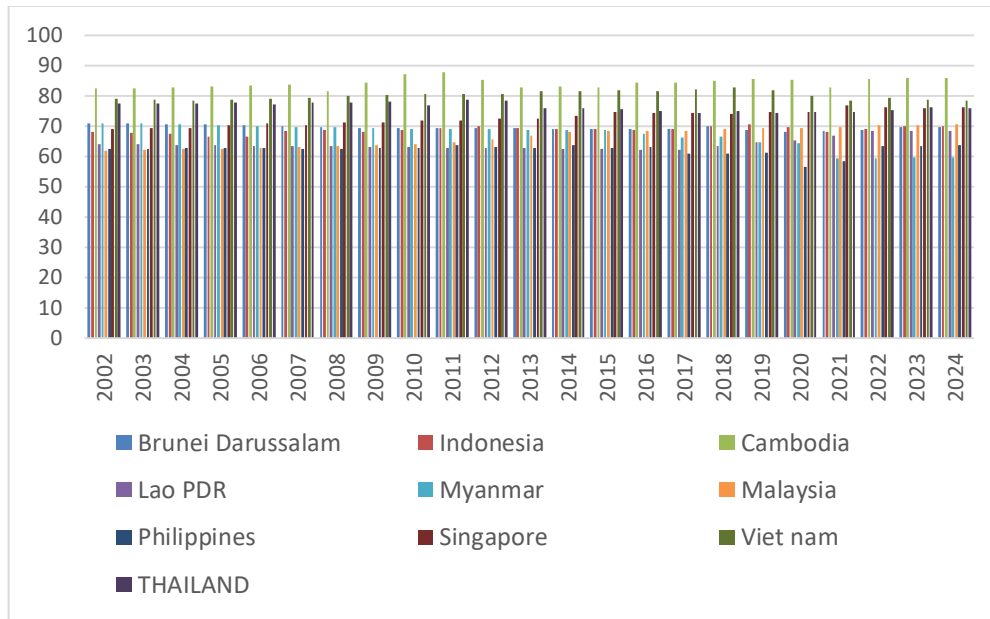
Dalam teori pertumbuhan ekonomi Solow, peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional. Akan tetapi, kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih optimal apabila didukung oleh investasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, hubungan antara *LFPR* dan pertumbuhan ekonomi perlu dianalisis secara bersama-sama dengan variabel *FDI* dan tata kelola pemerintahan. Mincer (1996) menyatakan bahwa interaksi timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan *Human capital*/modal manusia merupakan salah satu determinan utama dalam mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap aspek lain, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan tingkat kemiskinan. Gagasan bahwa modal manusia memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu pandangan yang berkembang dalam literatur *new growth theory*, sebagaimana dikemukakan oleh Lucas (1988) dan Romer (1990).

Pengembangan tenaga kerja meningkatkan tingkat output secara positif dan signifikan berdasarkan hasil penelitian Eigbiremolen dan Anaduaka (2014). Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ber-

kelanjutan, mengingat setiap peningkatan dalam kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh peningkatan kinerja ekonomi. Dengan demikian, terdapat hubungan yang jelas antara pengembangan sumber daya manusia dan tingkat output. Dalam penelitian ini, *human capital* digambarkan dengan *labor force participation rate /LFPR* (tingkat partisipasi angkatan kerja). Tenaga kerja menentukan kapasitas output suatu negara sebagai salah satu faktor produksi utama dalam teori pertumbuhan neoklasik Solow (Solow, 1956). Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi adalah *Labor Force Participation Rate (LFPR)*. *LFPR* menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.

Tingkat *LFPR* atau partisipasi angkatan kerja yang tinggi mencerminkan pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih optimal dalam proses produksi. Sebaliknya, rendahnya partisipasi angkatan kerja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena sebagian potensi tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara produktif. Di ASEAN, perkembangan *LFPR* menunjukkan variasi yang cukup besar antarnegara. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif tinggi, sementara beberapa negara lainnya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi tenaga kerja perempuan, ketimpangan keterampilan, dan tingginya sektor informal.

Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen, investasi asing langsung dapat meningkatkan produktivitas melalui transfer teknologi, inovasi, dan peningkatan kapasitas produksi. Namun demikian, manfaat tersebut tidak akan optimal apabila negara penerima investasi memiliki kualitas kelembagaan yang rendah atau tenaga kerja yang tidak mampu menyerap teknologi baru. Perkembangan *Labor Force Participation Rate (LFPR)* di 10 negara ASEAN dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



sumber: word bank 2026 (diolah)

Gambar 3. LFPR di Negara ASEAN tahun 2002-2024 (%)

Labor Force Partipation Rate (LFPR) pada Gambar 1.3 di Sepuluh negara ASEAN menunjukkan nilai rata-rata yang cukup stabil dari tahun 2002-2024. Nilai rata-rata yaitu kisaran 70,3% sampai 71,9%. *LFPR* tertinggi tercatat pada negara Kamboja dengan rata-rata *LFPR* sebesar 84,2%, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada Filipina yaitu sebesar 62,3%. Selain *Foreign Direct Investment (FDI)* dan *Labor Force Partipation Rate (LFPR)*, keberadaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan oleh adanya partisipasi serta sinergi antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Agus, 2011).

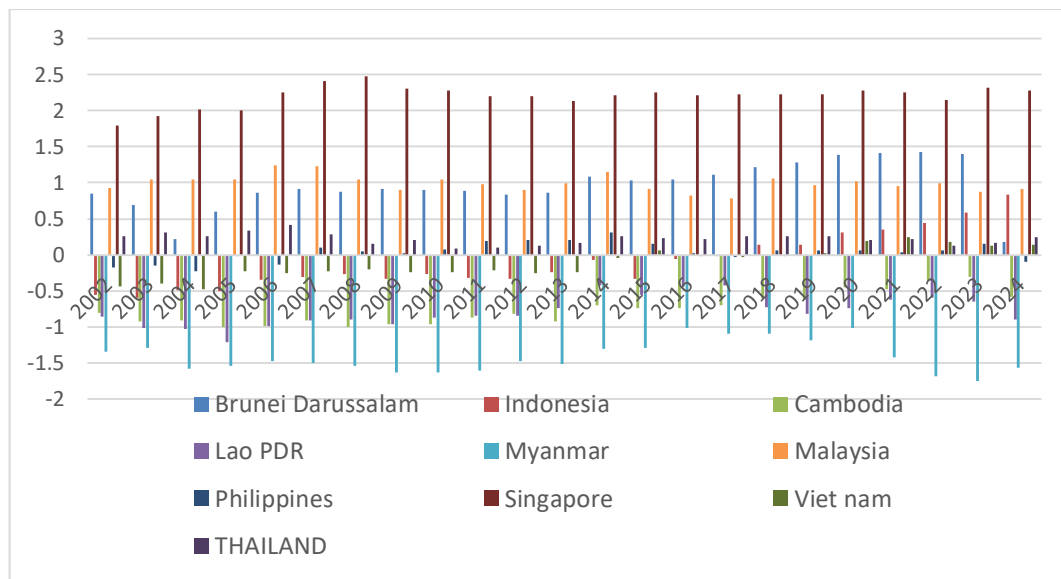
Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berfungsi sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel (World Bank, 1992; ADB, 1995; UNDP, 1997). *good governance* dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli, khususnya di negara-negara berkembang, sebagai upaya untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Mengacu pada laporan World Bank yang disusun oleh Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton (2009). Konsep tata kelola pemerintahan dalam kaitannya dengan

pertumbuhan ekonomi menjadi topik yang menarik untuk dikaji, khususnya pada kawasan yang memiliki intensitas kerja sama antarnegara. ASEAN (*Association of South east Asian Nations*) yang berada di kawasan Asia Tenggara dipilih sebagai objek penelitian. Berdasarkan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), periode 2002–2024 merupakan fase dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif optimal bagi negara-negara ASEAN. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya minat negara-negara Eropa dan China untuk menanamkan investasi yang lebih besar di kawasan ASEAN.

Tata kelola pemerintahan diukur melalui indikator pengendalian korupsi, efektivitas pemerintahan, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan atau terorisme, kualitas regulasi, supremasi hukum, serta partisipasi dan akuntabilitas (Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2010). Selanjutnya, World Bank (2012) menyatakan bahwa terdapat dua dimensi utama tata kelola pemerintahan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu *government effectiveness* (efektivitas pemerintahan) dan *control of corruption* (pengendalian korupsi). Setiap indikator tersebut diukur menggunakan skala indeks dengan rentang nilai antara -2,5 hingga 2,5, di mana nilai -2,5 merepresentasikan kinerja terendah dalam penerapan tata kelola pemerintahan, sedangkan nilai 2,5 menunjukkan capaian tertinggi dari kualitas tata kelola pemerintahan di suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran tingkat efektivitas pemerintahan (*government effectiveness*). Hasil penelitian Md. Rafayet et al. (2017) mengindikasikan bahwa *government effectiveness* memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan publik serta keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Wibowo (2013) menemukan hasil yang berbeda, yaitu adanya pengaruh negatif yang signifikan antara *government effectiveness* dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui kondisi di mana semakin tinggi efektivitas pelayanan publik suatu negara, maka kebutuhan belanja pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan menyediakan layanan publik cenderung menjadi lebih efisien atau menurun.

Peningkatan *government effectiveness* mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Efisiensi dalam pengeluaran publik tersebut secara tidak langsung berpotensi mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Perkembangan *government effectiveness* di 10 anggota Negara ASEAN dapat dilihat pada Gambar berikut :



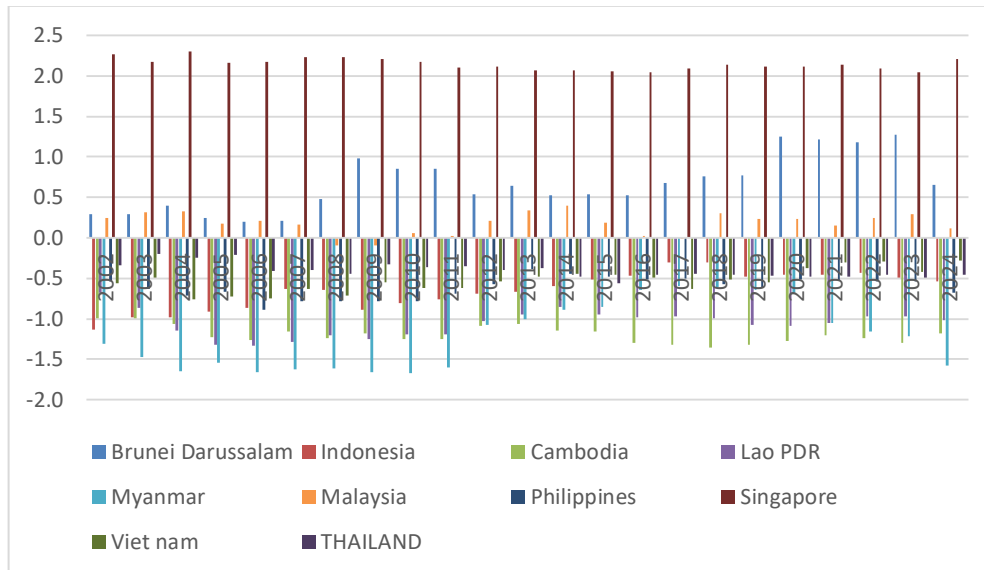
Sumber: World Bank, 2026 (diolah)

Gambar 4. GE di 10 Negara Anggota ASEAN Tahun 2002-2024 (indeks)

Efektivitas pemerintahan (*government effectiveness*) di negara-negara ASEAN sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Berdasarkan nilai rata-rata indeks, negara-negara yang memiliki tingkat *government effectiveness* relatif tinggi, yakni dengan skor mendekati atau di atas 2,5, meliputi Singapura 2.20 , Malaysia 0.99, dan Brunei Darussalam 0.95 Sebaliknya, Myanmar -1.41, Laos -0.78, dan Kamboja -0.75 cenderung berada pada kategori efektivitas pemerintahan yang rendah, dengan nilai indeks mendekati atau di bawah -2,5. Sedarmayanti (2003), terdapat keterkaitan yang bersifat positif antara pertumbuhan ekonomi dan efektivitas pemerintahan.

Dalam lingkup negara-negara ASEAN, perbedaan tingkat efektivitas pemerintah mencerminkan adanya hubungan dengan performa pertumbuhan ekonomi, di mana kualitas tata kelola pemerintahan berperan sebagai salah satu determinan utama. Oleh karena itu, relasi antara pertumbuhan ekonomi dan *government effectiveness* di kawasan ASEAN dapat dikatakan berjalan secara searah. Sebagai ilustrasi, Singapura merupakan negara dengan tingkat efektivitas pemerintahan yang sangat tinggi. Kondisi ini ditopang oleh karakteristik wilayah yang relatif kecil, jumlah penduduk yang terbatas, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan negara secara lebih optimal dan efisien. Indikator lainnya dalam tata kelola pemerintahan yang turut dipertimbangkan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah *control of corruption*.

Kaufmann et al., sebagaimana dikutip dalam Huynh dan Jacho-Chávez (2009), mendefinisikan *control of corruption* sebagai suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kekuasaan publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk di dalamnya praktik korupsi. Huynh dan Jacho-Chávez (2009) menyatakan bahwa indikator *control of corruption* merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aidt, Dutta, dan Sena (2008), yang mengkaji keterkaitan antara *corruption perception index* dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada negara-negara dengan kualitas institusi yang rendah, korupsi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, Sanyal (2011) mengemukakan pandangan yang berbeda, yaitu bahwa *control of corruption* justru memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan *control of corruption* di sepuluh Negara anggota ASEAN disajikan pada gambar dibawah ini :



Sumber: World Bank, 2026

Gambar 5. CC di 10 Negara Anggota ASEAN 2002-2024 (indeks)

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa dari sepuluh negara ASEAN, *control of corruption* yang memiliki nilai indeks 2,5 dan lebih baik adalah Singapura dengan nilai indeks rata-rata 2.14 Brunei Drussalam dengan nilai indeks rata-rata 0.66, Sedangkan yang memiliki kecenderungan *control of corruption* dengan nilai indeks -2,5 kurang baik yaitu Myanmar, Kamboja, Filipina dan Indonesia dimana masing masing Negara tersebut memiliki indeks rata-rata *control of corruption* sebesar -1.56, -1.18, -0.68, dan -0,54. Berikut kekurangan dari penelitian terdahulu sehingga penelitian ini penting dilakukan :

1.1.1 Fenomena Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN

Meskipun ASEAN berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, tingkat pertumbuhan ekonomi antarnegara anggota masih menunjukkan disparitas yang cukup besar. Negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Filipina dalam beberapa tahun terakhir mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sedangkan beberapa negara lainnya mengalami perlambatan akibat keterbatasan kapasitas institusi, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan ketergantungan terhadap sektor ekonomi tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang masuk

ke suatu negara, tetapi juga oleh kemampuan institusi dan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola modal tersebut.

1.1.2 Kesenjangan Empiris Penelitian

Hasil penelitian empiris mengenai pengaruh *FDI* terhadap pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menyimpulkan bahwa *FDI* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan produktivitas dan transfer teknologi. Namun, penelitian lain menemukan bahwa pengaruh *FDI* tidak signifikan apabila tidak didukung oleh kualitas institusi dan sumber daya manusia yang memadai. Perbedaan hasil penelitian juga ditemukan pada variabel tata kelola pemerintahan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa *Government effectiveness* memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh tersebut berbeda antarnegara karena dipengaruhi oleh karakteristik institusional masing-masing negara.

Penelitian terhadap *LFPR* yang masih menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja tidak selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila produktivitas tenaga kerja masih rendah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *FDI*, *LFPR*, tata kelola pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi masih memerlukan pengujian lebih lanjut menggunakan data yang lebih panjang, cakupan negara yang lebih luas, serta pendekatan analisis yang lebih komprehensif.

1.1.3 Alasan Pemilihan Periode 2002–2024

Penelitian ini menggunakan periode 2002–2024 karena rentang waktu tersebut mampu menggambarkan berbagai fase penting perkembangan ekonomi ASEAN. Periode penelitian mencakup fase pemulihan pasca Krisis Asia, krisis keuangan global 2008, pembentukan ASEAN Economic Community (AEC), pandemi COVID-19, serta masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Penggunaan periode yang panjang memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan jangka panjang antara *FDI*, *LFPR*, tata kelola

pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, periode tersebut juga memberikan variasi data yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil estimasi model panel data.

Berdasarkan uraian fenomena empiris, kesenjangan penelitian, serta pentingnya peran investasi asing, partisipasi angkatan kerja, dan tata kelola pemerintahan dalam proses pembangunan ekonomi, maka penelitian mengenai pengaruh Foreign Direct Investment (*FDI*), Labor Force Participation Rate (*LFPR*), dan tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN periode 2002–2024 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris terbaru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ASEAN.

1.1.4 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan variabel *FDI*, *LFPR*, dan tata kelola pemerintahan dalam satu model pertumbuhan ekonomi.
2. Menggunakan data panel negara-negara ASEAN selama periode 2002-2024 sehingga mencakup berbagai peristiwa ekonomi penting seperti:
 1. Krisis keuangan global 2008.
 2. Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC).
 3. Pandemi COVID-19.
 4. Pemulihan ekonomi pascapandemi.
3. Menggunakan indikator tata kelola pemerintahan dari Worldwide Governance Indicators (WGI) yang memberikan ukuran kelembagaan yang lebih komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Foreign Direct Investment (FDI)* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2002-2024 (23 tahun)?
2. Apakah *Labor Force Partisipation Rate (LFPR)* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama selama 2002-2024 (23 tahun)?
3. Apakah *goverment effectiveness* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama selama 2002-2024 (23 tahun)?
4. Apakah *control of corruption* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama selama 2002-2024 (23 tahun)?
5. Apakah *Foreign Direct Investment (FDI)*, *Labor Force Partisipation Rate (LFPR)*, *goverment effectiveness*, dan *control of corruption* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2002-2024 (23 tahun)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *Foreign Direct Investment (FDI)* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2002-2024 (23 tahun)?
2. Menganalisis pengaruh *Labor Force Partisipation Rate (LFPR)* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2002-2024 (23 tahun)?
3. Menganalisis pengaruh *goverment effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2002-2024 (23 tahun)?
4. Menganalisis pengaruh *control of corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2002-2024 (23 tahun)?
5. Menganalisis pengaruh *Foreign Direct Investment (FDI)*, *Labor Force Partisipation Rate (LFPR)*, *goverment effectiveness*, dan *control of corruption* secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2002-2024 (23 tahun)?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif serta pemahaman yang lebih luas terkait tata kelola pemerintahan di negara-negara ASEAN.

Bagi peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kuantitatif yang mencerminkan perkembangan kondisi perekonomian dalam suatu periode tertentu apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya (Sukirno, 2007). Perubahan tersebut umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu tahun relatif terhadap tahun sebelumnya. Budiono (1994) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang yang ditunjukkan oleh kecenderungan kenaikan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Proses ini bersumber dari dinamika internal perekonomian, yakni kekuatan yang berasal dari dalam sistem ekonomi itu sendiri, bukan akibat pengaruh faktor eksternal yang bersifat sementara (Sukirno, 2019; Kuznets, 1973)

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi bagi masyarakatnya. Peningkatan kemampuan tersebut didorong oleh kemajuan teknologi serta penyesuaian dalam aspek kelembagaan dan ideologi yang menyertainya (Kuznets, 1973). Lebih lanjut, dalam karyanya *Modern Economic Growth* (1966), Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan berkelanjutan dalam output per kapita maupun per tenaga kerja, yang pada umumnya disertai dengan penambahan jumlah penduduk serta perubahan dalam struktur ekonomi (Jhingan, 2004). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan Gross Domestic Product (GDP) tanpa memperhatikan apakah laju kenaikan tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, tanpa mempertimbangkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi (Suryana, 2002).

Zaris (2003), menyatakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu komponen yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Di sisi lain, Samuelson (2005) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang menunjukkan terjadinya ekspansi atau peningkatan Gross Domestic Product (GDP) suatu negara. Pertumbuhan ekonomi memberikan ruang bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai dampak kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi, serta sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Todaro dan Smith (2006) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap negara didasarkan pada tiga komponen utama yang menjadi fondasinya yaitu :

1. Akumulasi modal meliputi seluruh bentuk penanaman investasi baru, baik yang berkaitan dengan lahan, peralatan fisik, maupun modal manusia atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang pada periode selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan jumlah angkatan
3. Kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berimplikasi langsung pada terwujudnya pembangunan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi umumnya diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi berada di bawah laju pertumbuhan penduduk, maka pendapatan rata-rata masyarakat atau pendapatan per kapita cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, jika dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi berlangsung sebanding dengan pertumbuhan penduduk, maka perekonomian akan berada pada kondisi stagnan tanpa disertai peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu prasyarat penting dalam mencapai pembangunan ekonomi adalah bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (Sukirno, 2007).

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Keynes

Teori ekonomi Keynes berlandaskan pada hipotesis mengenai siklus aliran uang, yang menekankan bahwa peningkatan pengeluaran, terutama konsumsi, dalam suatu perekonomian akan mendorong kenaikan pendapatan. Selanjutnya, peningkatan pendapatan tersebut akan kembali merangsang pertumbuhan konsumsi, sehingga membentuk suatu siklus berkelanjutan antara pengeluaran dan pendapatan. Dalam kerangka pemikiran Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh individu berperan sebagai sumber pendapatan bagi individu lain dalam perekonomian yang sama. Dengan demikian, setiap aktivitas pengeluaran tidak hanya berdampak pada pelaku ekonomi yang bersangkutan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pihak lain. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan memungkinkan perekonomian beroperasi secara normal.

Pada saat terjadinya *Great Depression*, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi dan lebih memilih untuk menahan serta menyimpan uangnya, yang pada akhirnya menghambat perputaran ekonomi. Teori Keynes menyimpulkan Kondisi tersebut akan menyebabkan terhentinya siklus perputaran uang dalam perekonomian, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya stagnasi bahkan kelumpuhan aktivitas ekonomi (wisegeek.org, 2017). Sebagai solusi untuk mengatasi hambatan dalam perekonomian, Keynes menekankan pentingnya intervensi dari sektor publik, khususnya pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu berperan aktif dalam mendorong peningkatan pengeluaran masyarakat, baik melalui kebijakan peningkatan jumlah uang beredar maupun dengan melakukan pengeluaran langsung melalui pembelian barang dan jasa.

Dalam perspektif ekonomi Keynesian, keterlibatan sektor publik dianggap diperlukan untuk menstimulasi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pandangan ini bertentangan dengan konsep *laissez-faire capitalism*, yang menolak campur tangan pemerintah dan meyakini bahwa mekanisme pasar bebas mampu mencapai keseimbangan secara otomatis. Keynes berargumen bahwa sektor swasta tidak

dapat sepenuhnya diberikan kewenangan dalam mengelola perekonomian, karena pada dasarnya pelaku swasta berorientasi pada pencapaian keuntungan pribadi. Apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa pengawasan, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan suatu otoritas yang memiliki fungsi pengendalian dan pengaturan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara optimal, yang dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah (Kartika, 2015). Teori Keynes mengkritisi kebijakan pemerintah yang terlalu menekankan pada peningkatan tabungan tanpa diimbangi dengan dorongan terhadap konsumsi. Selain itu, Keynes juga mendukung adanya distribusi kekayaan secara terukur apabila diperlukan. Dalam kerangka pemikirannya, terdapat alasan pragmatis yang mendasari pentingnya redistribusi pendapatan, yaitu bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung memiliki kecenderungan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menabung. Oleh karena itu, pemberian tambahan pendapatan kepada kelompok tersebut akan meningkatkan pengeluaran konsumsi, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik (Solow Growth Theory)

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow (1956) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam model Solow, modal dan tenaga kerja merupakan faktor produksi utama yang menentukan tingkat output suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila terjadi peningkatan investasi yang mampu menambah stok modal serta peningkatan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Menurut Solow (1956), investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas produksi suatu negara karena investasi memungkinkan terbentuknya modal baru yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga kerja juga akan memperbesar kapasitas produksi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini FD merepresentasikan akumulasi modal, sedangkan $LFPR$ merepresentasikan faktor tenaga kerja yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth Theory)

Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer (1990) dan Lucas (1988) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, inovasi, transfer teknologi, dan pengetahuan. Teori ini menekankan bahwa investasi asing mampu menciptakan spillover effect berupa transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan kapasitas produksi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen, *FDI* tidak hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana transfer teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas faktor produksi domestik. Oleh karena itu, negara yang mampu menarik investasi asing dalam jumlah besar cenderung memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Teori Kelembagaan (Institutional Theory)

Teori kelembagaan yang dikembangkan oleh North (1990) menjelaskan bahwa institusi merupakan aturan formal dan informal yang mengatur interaksi ekonomi dalam masyarakat. Kualitas institusi yang baik akan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas kebijakan publik, mengurangi biaya transaksi, dan mendorong aktivitas ekonomi. Menurut North (1990), pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mengatur aktivitas ekonomi tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi, memperkuat kepercayaan investor, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebaliknya, lemahnya tata kelola pemerintahan dapat menghambat investasi dan menurunkan produktivitas ekonomi. Dalam penelitian ini, tata kelola pemerintahan diukur menggunakan indikator Worldwide Governance Indicators (WGI) yang dikembangkan oleh World Bank. Indikator tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik secara efektif.

2.1.2 Foreign Direct Investment (FDI)

Investasi asing dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni investasi asing langsung atau *foreign direct investment (FDI)* dan investasi portofolio asing. Investasi asing langsung merupakan bentuk penanaman modal yang bersifat jangka panjang, di mana investor dari suatu negara menanamkan dananya di negara tujuan melalui berbagai aktivitas, seperti pendirian perusahaan, akuisisi secara penuh, maupun pengambilalihan aset-aset produktif, termasuk pembangunan fasilitas produksi serta pengadaan barang modal dan bahan baku. Sementara itu, investasi portofolio asing merujuk pada kegiatan investasi yang dilakukan melalui instrumen keuangan, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan instrumen sejenis lainnya. Dalam hal ini, sumber pembiayaan berasal dari pihak asing, Namun demikian, pengelolaannya dilakukan oleh pihak domestik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, khususnya Pasal 1, menyatakan bahwa pengertian modal asing dalam regulasi tersebut dibatasi pada penanaman modal asing secara langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko atas investasi yang ditanamkannya. Krugman (1994) mendefinisikan investasi asing langsung (*foreign direct investment/FDI*) sebagai aliran modal internasional yang terjadi ketika perusahaan dari suatu negara melakukan pendirian atau perluasan kegiatan usahanya di negara lain. Ciri utama dari penanaman modal asing langsung tidak hanya terletak pada perpindahan sumber daya, tetapi juga mencakup adanya unsur pengendalian (*control*) dalam pengelolaannya. Dengan demikian, cabang atau anak perusahaan yang didirikan di negara tujuan tidak sekadar memiliki hubungan finansial dengan perusahaan induk, melainkan menjadi bagian integral dari satu kesatuan struktur organisasi.

Investasi asing langsung memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Pertama, investasi ini umumnya bersifat jangka panjang sehingga berpotensi memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi investor,

terutama apabila pengelolaan perusahaan atau pabrik dilakukan secara efektif. Kedua, keberadaan investasi asing langsung dapat meningkatkan pendapatan riil suatu negara melalui masuknya aliran modal dari luar negeri. Ketiga, investasi ini turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya ketika investor mendirikan fasilitas produksi atau perusahaan di negara tujuan. Keempat, investasi asing langsung juga berperan dalam transfer pengetahuan, baik dalam bentuk keterampilan manajerial yang kompetitif maupun penguasaan teknologi yang lebih maju.

2.1.2.1 Peranan Foreign Direct Investment (FDI) dalam Perekonomian

Apabila dikaji secara lebih mendalam, investasi asing langsung (*foreign direct investment/FDI*) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Iklim investasi yang kondusif akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya, sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi. *FDI* berperan dalam berbagai aspek perekonomian, antara lain: pertama, sebagai sumber pembiayaan yang dapat mempercepat proses investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi; Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut perlu disertai dengan penyesuaian pada struktur produksi dan perdagangan nasional; dan ketiga, modal asing berperan sebagai instrumen mobilisasi dana yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 2004).

Sadono Sukirno (2000) menyatakan investasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh masyarakat memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional melalui aktivitas perdagangan internasional, serta mendorong kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari terbukanya peluang kerja. Fenomena tersebut berlandaskan pada tiga fungsi utama investasi, yaitu: pertama, investasi sebagai salah satu komponen dalam pengeluaran agregat yang berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja; kedua, investasi berperan dalam memperluas kapasitas produksi; dan ketiga, investasi mendorong perkembangan teknologi di suatu negara.

2.1.2.2 Dampak *Foreign Direct Investment (FDI)* terhadap Perekonomian

1. Pengaruh *Foreign Direct Investment (FDI)* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Foreign direct investment (FDI) merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh investor asing dengan tujuan memperoleh kendali atau pengaruh signifikan terhadap perusahaan di negara penerima investasi. *FDI* berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan stok modal, transfer teknologi, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas ekspor. Menurut teori pertumbuhan endogen, masuknya investasi asing dapat meningkatkan produktivitas faktor produksi melalui transfer pengetahuan dan inovasi teknologi. Selain itu, investasi asing juga mampu mempercepat proses industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa *FDI* memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk negara-negara ASEAN. Dengan demikian, semakin tinggi arus masuk *FDI* ke suatu negara maka semakin besar peluang peningkatan aktivitas produksi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adanya *foreign direct investment (FDI)* di suatu negara tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif. Dari sisi positif, *FDI* dapat meningkatkan ketersediaan modal untuk pembangunan serta menambah cadangan devisa negara, serta meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, *FDI* turut mendorong terjadinya alih teknologi dan peningkatan keterampilan manajerial, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan permintaan terhadap bahan baku domestik. Namun demikian, manfaat tersebut sering kali diiringi dengan berbagai konsekuensi negatif. Pengelolaan sumber daya alam oleh pihak asing berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan pendapatan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Perusahaan asing juga cenderung menerapkan sistem manajemen keuangan yang kurang transparan, sehingga menyulitkan dalam menilai kondisi keuangan perusahaan secara akurat, serta berbagai dampak lainnya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Foreign Direct Investment (FDI)*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *FDI*, antara lain:

1. Tingkat Bunga

Tingkat suku bunga memegang peranan penting dalam menentukan besarnya investasi yang terjadi di suatu negara. Ketika suku bunga berada pada level yang rendah, kecenderungan investasi akan meningkat karena biaya pinjaman menjadi lebih terjangkau dan kredit perbankan masih memberikan prospek keuntungan bagi investor. Sebaliknya, apabila suku bunga tinggi, maka biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga kegiatan investasi yang dibiayai melalui kredit bank menjadi kurang menguntungkan. Dengan demikian, suku bunga merupakan salah satu faktor krusial dalam menarik minat investasi, mengingat sebagian besar aktivitas investasi bergantung pada pembiayaan dari lembaga perbankan. Penurunan suku bunga pinjaman akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya, karena beban biaya yang harus ditanggung menjadi lebih ringan.

2. *Marginal Efficiency of Capital (MEC)*

Marginal Efficiency of Capital (MEC) merupakan konsep yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes untuk menjelaskan penentuan tingkat investasi dalam suatu perekonomian, termasuk investasi asing. MEC didefinisikan sebagai tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi (*return on investment*). Apabila tingkat keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga riil yang berlaku, maka investasi cenderung tidak akan dilakukan. Sebaliknya, jika MEC lebih tinggi dari suku bunga riil, maka investasi akan dilaksanakan. Sementara itu, Apabila nilai MEC berada pada tingkat yang setara dengan suku bunga riil, maka keputusan untuk melakukan investasi akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pertimbangan tersebut.

3. Pertumbuhan Perekonomian

Ekspektasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang merupakan salah satu determinan penting yang memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modal. Apabila terdapat perkiraan bahwa aktivitas ekonomi akan mengalami ekspansi, kondisi tersebut cenderung mendorong meningkatnya

minat investor untuk melakukan investasi. Bahkan, dalam situasi di mana tingkat suku bunga lebih tinggi dibandingkan dengan *Marginal Efficiency of Capital* (MEC), keputusan investasi tetap dapat diambil oleh investor yang memiliki toleransi risiko serta mampu mengidentifikasi peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa depan.

4. Kestabilan politik suatu negara

Stabilitas politik suatu negara merupakan salah satu aspek krusial yang menjadi pertimbangan investor dalam menentukan keputusan investasi. Kondisi politik yang stabil mampu menciptakan rasa aman serta kepastian, sehingga mendorong meningkatnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di negara tujuan. Sebaliknya, ketidakstabilan politik berpotensi menimbulkan tingkat risiko yang tinggi dan pada akhirnya menurunkan minat investor untuk berinvestasi.

5. Keamanan suatu negara

Faktor keamanan suatu negara merupakan aspek penting yang menjadi pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modal. Tingkat keamanan yang baik akan memberikan jaminan dan rasa percaya diri bagi investor untuk melakukan investasi. Sebaliknya, kondisi yang tidak kondusif seperti kerusuhan, konflik antarsuku, agama, maupun etnis, serta kecemburuan sosial, dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko tinggi. Hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan minat investor karena tidak adanya jaminan keamanan terhadap aktivitas investasi yang dilakukan.

6. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang kondusif memiliki peranan penting dalam menciptakan iklim investasi yang menarik. Kebijakan moneter yang bersifat longgar (*easy monetary policy*), misalnya, ditandai dengan tingkat suku bunga yang rendah serta kemudahan dalam penyaluran kredit, sehingga mampu mendorong peningkatan aktivitas investasi. Selain itu, kebijakan fiskal yang mendukung, seperti pemberian insentif berupa *tax holiday*, penerapan tarif pajak yang rendah (baik pajak keuntungan usaha, bea masuk, maupun pajak

pertambahan nilai), serta biaya energi yang terjangkau (listrik dan bahan bakar), turut memberikan dampak positif terhadap minat investor. Di sisi lain, kemudahan dalam proses perizinan serta birokrasi yang efisien juga menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat ketat, seperti suku bunga tinggi, beban pajak yang besar, serta prosedur perizinan yang rumit, cenderung menghambat masuknya investasi karena meningkatkan biaya dan risiko bagi investor.

7. Infrastruktur

Kondusivitas iklim investasi juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur seperti kualitas jalan, keberadaan pelabuhan yang representatif, ketersediaan sumber energi bagi kegiatan industri, serta sarana transportasi dan telekomunikasi yang efektif akan menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan akhirnya meningkatkan minat investasi. Dalam aktivitas *Foreign Direct Investment (FDI)* di suatu negara tujuan (*host country*), terdapat dua faktor utama yang memengaruhinya. Pertama, lingkungan atau kerangka kebijakan (*policy framework*), dan kedua, faktor ekonomi (*economic determinants*) (Rahayu, 2012). Kedua aspek ini menjadi pertimbangan penting bagi suatu negara dalam upaya menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Stephen Hymer, Menyatakan investasi langsung merupakan bagian dari kerangka teori persaingan tidak sempurna, sehingga tidak semata-mata dapat dijelaskan melalui teori persaingan sempurna maupun pergerakan modal internasional. Hymer menekankan bahwa inti dari penanaman modal asing secara langsung terletak pada kepemilikan keunggulan monopolistik oleh perusahaan induk. Dalam pendekatan ini, tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di luar negeri tidak sepenuhnya mampu menjelaskan terjadinya arus modal internasional, karena secara teoritis modal dapat dialokasikan secara lebih efisien melalui pasar keuangan tanpa harus memindahkan operasi perusahaan (Hymer, 1976). Tingkat keuntungan investasi di luar negeri akan lebih tinggi apabila investor memiliki keunggulan spesifik dibandingkan perusahaan lokal di negara tujuan, serta didukung oleh kondisi makro ekonomi negara yang relatif unggul dan stabil.

2.1.3 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participation Rate /LFPR*)

Theodore Schultz (1961), menyatakan bahwa teori investasi dalam *human capital* menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi. Konsep ini menjelaskan bahwa pendidikan, keterampilan, dan produktivitas merupakan elemen utama yang melekat pada setiap individu. Dalam kerangka teori ini, individu dipandang melakukan investasi terhadap dirinya sendiri melalui berbagai bentuk, seperti pendidikan, kesehatan, pengalaman kerja, dan pengembangan keterampilan. Lebih lanjut, teori *human capital* menegaskan bahwa sektor pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan individu yang produktif dan berkualitas tinggi. Modal manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berimplikasi pada peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia merupakan indikator penting dalam meningkatkan produktivitas suatu perekonomian. Perbedaan kualitas sumber daya manusia diyakini dapat menimbulkan variasi kondisi ekonomi antarnegara, terutama karena masing-masing negara memiliki jumlah tenaga kerja, ketersediaan sumber daya alam, serta tingkat penguasaan teknologi yang berbeda (Denis, 2017). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur *human capital* dapat dilihat melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate/LFPR*). *LFPR* menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi menunjukkan pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih optimal dalam proses produksi. Teori pertumbuhan neoklasik menyatakan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara langsung memengaruhi tingkat output suatu negara. Semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, semakin besar kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Peningkatan *LFPR* juga mencerminkan meningkatnya produktivitas ekonomi masyarakat karena lebih banyak penduduk yang terlibat

dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, *LFPR* diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

International Labour Organization (ILO), tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang telah memasuki usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas. Kelompok ini mencakup seluruh individu yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa apabila terdapat permintaan terhadap tenaga kerja mereka, serta memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tersebut. Selanjutnya, menurut Rusli (2012: 116), angkatan kerja merupakan *economically active population*, yaitu individu yang bekerja, menerima pendapatan, atau sedang berupaya untuk memperoleh pekerjaan. Secara demografis, Besarnya jumlah angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate/LFPR*), yang mencerminkan persentase penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi (Lembaga Demografi FEUI, 2004: 206).

Pertumbuhan angkatan kerja merupakan hasil dari tren perubahan demografi di masa lalu yang terbentuk sebagai respons terhadap kondisi perekonomian pada periode sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, yang dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja baik secara keseluruhan maupun berdasarkan kelompok umur tertentu dengan total penduduk usia kerja (Lembaga Demografi FEUI, 2004: 198).. W. Arthur Lewis mengemukakan bahwa kelebihan tenaga kerja justru dapat menjadi peluang bagi suatu negara. Dalam teorinya, kelebihan tenaga kerja pada satu sektor dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif, sehingga mampu mendorong peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi. Lewis membagi perekonomian negara berkembang ke dalam dua sektor utama, yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional umumnya identik dengan kegiatan pertanian, sementara sektor modern mencakup industri dan kegiatan ekonomi yang lebih maju. Selain itu, keberadaan sektor informal tidak hanya terbatas di wilayah pedesaan, tetapi juga berkembang di kawasan perkotaan.

Dalam proses industrialisasi, kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor modern cenderung beralih ke sektor informal, sehingga sektor ini berfungsi sebagai penampung tenaga kerja sekaligus turut mendukung dinamika perekonomian. Sektor informal kerap dipandang sebagai “katup pengaman” dalam bidang ketenagakerjaan karena kemampuannya dalam menyerap kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor formal. Peran ini penting terutama di negara berkembang, karena dapat menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam jangka panjang, penyerapan tenaga kerja tersebut berpotensi meningkatkan tingkat upah, khususnya di wilayah pedesaan, sehingga kesenjangan pendapatan antara daerah pedesaan dan perkotaan dapat berkurang. Dengan demikian, peningkatan jumlah tenaga kerja pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Novranyo, 2016).

Todaro dan Smith (2011), menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja pada periode mendatang. Jumlah tenaga kerja yang besar berpotensi menjadi sumber peningkatan tenaga kerja produktif. Namun demikian, pengaruh pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat positif. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan sistem perekonomian suatu negara dalam menyerap serta memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut secara produktif. Apabila tenaga kerja dapat diserap dengan baik, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika tidak terserap secara optimal, dapat menimbulkan masalah seperti pengangguran dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Tata Kelola Pemerintahan

Pertumbuhan perekonomian suatu negara pada era modern tidak lagi semata-mata diukur berdasarkan kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik memungkinkan suatu negara untuk mengoordinasikan serta mengintegrasikan berbagai kebijakan secara efektif, baik dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi. Tata kelola pemerintahan yang baik berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif bagi aktivitas investasi dan produksi. Pemerintahan yang efektif mampu menyediakan

layanan publik yang berkualitas, menjaga stabilitas kebijakan, serta menciptakan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi. Menurut teori kelembagaan, kualitas institusi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik cenderung memiliki tingkat efisiensi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan kualitas institusi yang rendah. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan juga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan investasi dan produktivitas tenaga kerja sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Globalisasi menjadikan setiap negara dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini mencakup kemampuan dalam mengelola sistem perekonomian, pemerintahan, serta birokrasi yang efisien dan transparan. Globalisasi juga mendorong terciptanya interaksi yang lebih cepat dan efisien antarwilayah maupun antarnegara, sehingga kualitas pelayanan publik dan kepastian kebijakan menjadi faktor penting dalam menarik investasi dan mendorong pembangunan ekonomi.

Suatu negara dapat dikatakan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik apabila mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Selain itu, *good governance* juga berorientasi pada peningkatan legitimasi pemerintah di mata masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip utama, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Orientasi ideal merujuk pada arah penyelenggaraan negara yang difokuskan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini berlandaskan pada prinsip demokratisasi dalam kehidupan bernegara, yang tercermin melalui sejumlah elemen utama, antara lain legitimasi kekuasaan, akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, jaminan terhadap hak asasi manusia (*securing of human rights*), penerapan otonomi serta desentralisasi kewenangan (*autonomy and devolution of power*), serta adanya kontrol sipil terhadap kekuasaan (*assurance of civilian control*).

Pemerintahan yang berfungsi secara ideal ditandai oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan nasional. Orientasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kapasitas pemerintah, serta sejauh mana struktur dan mekanisme politik maupun administratif mampu berfungsi secara optimal. *Good governance* dapat dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dengan mengedepankan sinergi interaksi yang konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* merupakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. UNDP (2016) menyatakan bahwa *good governance* mencakup prinsip-prinsip seperti legitimasi, kebebasan berpendapat, transparansi, akuntabilitas, kinerja, dan keadilan. UNDP (1997) mengidentifikasi sejumlah karakteristik utama dalam penerapan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi (*participation*), yaitu keterlibatan seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.
- b. Supremasi hukum (*rule of law*), yakni tersedianya kerangka hukum yang adil, ditegakkan secara konsisten, serta mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*transparency*), yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi serta kemudahan akses terhadap arus informasi publik.
- d. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu kemampuan lembaga dan proses pemerintahan dalam merespons kebutuhan serta kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- e. Berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*), yakni kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan guna mencapai kesepakatan terbaik bagi seluruh pihak.
- f. Keadilan (*equity*), yaitu pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dalam meningkatkan serta mempertahankan kualitas hidupnya.

- g. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), yaitu penyelenggaraan kegiatan dan kelembagaan yang mampu menghasilkan output sesuai kebutuhan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- h. Akuntabilitas (*accountability*), yakni adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan di sektor publik, swasta, dan masyarakat kepada publik serta para pemangku kepentingan.
- i. Visi strategis (*strategic vision*), yaitu kemampuan pemimpin dan masyarakat dalam memiliki pandangan jangka panjang terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia.

Seluruh prinsip tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling memperkuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang berkualitas tidak hanya tercermin dari proses yang dijalankan, tetapi juga dari hasil yang dicapai. Hal ini tercermin melalui terbangunnya sinergi antarunsur pemerintahan, adanya dukungan masyarakat, serta terciptanya stabilitas sosial yang kondusif bagi pembangunan. Selain itu, kualitas pemerintahan juga dapat diukur melalui tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Indikatornya meliputi peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, baik dari sisi produktivitas maupun daya beli, serta peningkatan kesejahteraan nonmaterial, seperti rasa aman, kebahagiaan, dan semangat kebangsaan. Dengan demikian, *good governance* menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.1.4.1 Indeks Tata Kelola Pemerintahan (World Governance Index/ WGI)

Dalam rangka mewujudkan praktik *good governance* yang efektif, diperlukan instrumen yang mampu mengukur kapasitas tata kelola secara objektif, salah satunya melalui *Index Good Governance* (IGG). Upaya pengembangan pengukuran indeks tata kelola pemerintahan berbasis konsep *governance* mulai diperkenalkan sejak tahun 1998 melalui indeks yang dikembangkan oleh Jeff Huther dan Anwar Shah. Selain model tersebut, terdapat berbagai pendekatan lain yang dapat digunakan dalam penyusunan indeks tata kelola berbasis *governance*. Pada umumnya, pendekatan-pendekatan tersebut menyusun indikator dengan

merujuk pada prinsip-prinsip utama *governance*, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum (*rule of law*).

Indikator yang digunakan dalam survei ini mencakup beberapa aspek utama tata kelola, yaitu: (a) akuntabilitas; (b) partisipasi; (c) penegakan hukum; (d) keadilan; dan (e) responsivitas politisi. (f) tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); serta (g) kualitas pelayanan publik. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang berfokus pada pengukuran IGG di tingkat pemerintah pusat (nasional), Governance and Decentralization Survey (GDS) mengembangkan pengukuran pada tingkat pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, dalam konteks pelaksanaan desentralisasi (Bappenas, 2008). Adapun tujuan penyusunan indeks tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. menghasilkan *World Governance Index* (WGI) yang menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi tata kelola pemerintahan secara global, berdasarkan data dari 179 negara yang menjadi objek penelitian. WGI menggabungkan lima indikator utama yang masing-masing terdiri atas 13 subindikator, sehingga secara keseluruhan mencakup 37 indeks. Indeks-indeks tersebut dipilih dari basis data terbaik yang tersedia dan bersumber dari lembaga-lembaga dengan reputasi tinggi dalam hal kualitas, kredibilitas, serta keandalan.
2. mendorong para aktor dalam tata kelola global untuk mempertimbangkan hasil WGI beserta bobot relatif masing-masing indikator. Hal ini memungkinkan identifikasi terhadap indikator-indikator kunci atau indikator perintis yang berperan dalam menciptakan kondisi bagi terwujudnya tata kelola yang baik serta menjamin keberlanjutannya. Berdasarkan gambaran situasi dan diagnosis yang dihasilkan oleh WGI, para pemangku kepentingan diharapkan mampu merumuskan pertanyaan strategis guna menemukan solusi yang tepat. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana praktik pemerintahan yang dijalankan telah memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

2.1.4.2 Indikator Tata Kelola Dunia (Worldwide Governance Indicators/ WGI)

menggunakan skala indeks yang berkisar antara $-2,5$ hingga $2,5$. Nilai $-2,5$ World Bank sejak tahun 1996 telah mengembangkan berbagai indikator untuk mengukur kualitas *good governance* di sejumlah negara. Indikator-indikator tersebut mencakup *control of corruption*, *government effectiveness*, *political stability and absence of violence*, *regulatory quality*, *rule of law*, serta *voice and accountability*. Setiap indikator yang dirumuskan oleh World Bank diukur menggunakan skala indeks yang berada pada rentang $-2,5$ hingga $2,5$. Nilai $-2,5$ merepresentasikan capaian terendah dalam kualitas tata kelola pemerintahan pada suatu negara, sedangkan nilai $2,5$ menunjukkan tingkat kinerja terbaik dalam setiap indikator *good governance*.

2.1.4.3 Government effectiveness

Konsistensi kebijakan, khususnya terkait keberlanjutan komitmen pemerintah meskipun terjadi pergantian pemerintahan; Menurut World Bank, *government effectiveness* mencerminkan persepsi terhadap kualitas penyelenggaraan layanan publik, mutu birokrasi beserta tingkat independensinya dari intervensi politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut MCC (*Millennium Challenge Corporation*), indikator *government effectiveness* di suatu negara dievaluasi berdasarkan sejumlah faktor berikut:

1. Kompetensi aparatur sipil negara, efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta tingkat kerentanan pelayanan publik terhadap intervensi politik;
2. Kemampuan dalam mengelola pergantian kekuasaan politik tanpa menimbulkan perubahan kebijakan yang signifikan maupun gangguan terhadap pelayanan publik;
3. Fleksibilitas, kapasitas pembelajaran, dan inovasi dalam kepemimpinan politik, termasuk kemampuan mengintegrasikan berbagai kepentingan menjadi kebijakan yang selaras;
4. Efisiensi dalam mobilisasi pendapatan serta pengelolaan anggaran negara;

5. Kualitas infrastruktur, yang mencakup transportasi, telekomunikasi, penyediaan listrik, layanan kesehatan masyarakat, pendidikan, serta ketersediaan layanan pemerintahan berbasis daring;
6. Konsistensi kebijakan, khususnya terkait keberlanjutan komitmen pemerintah meskipun terjadi pergantian pemerintahan.
7. Tingkat kompleksitas birokrasi, terutama sejauh mana prosedur administratif dapat menghambat kegiatan usaha;
8. Ketersediaan layanan informasi bagi wajib pajak

2.1.4.4 Control of Corruption

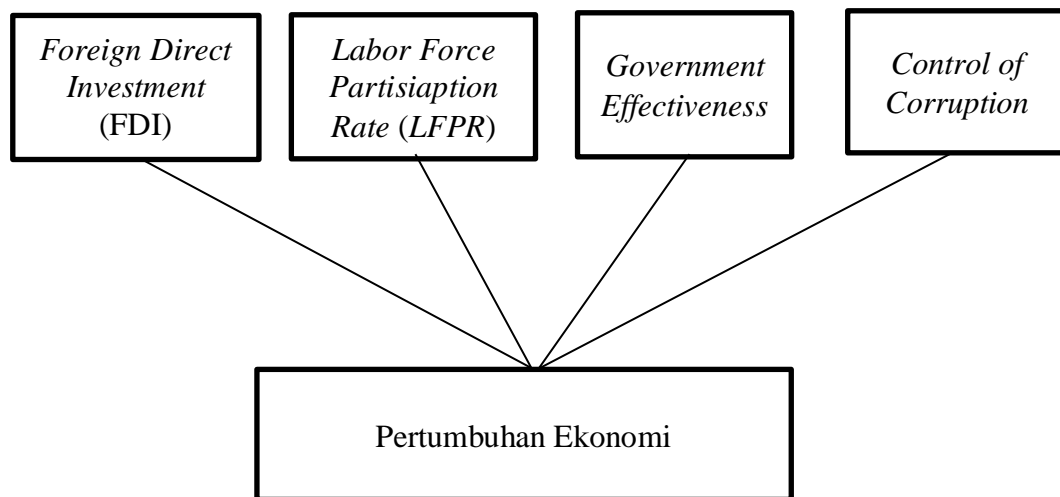
World Bank mendefinisikan *control of corruption* merupakan indikator yang digunakan untuk menilai persepsi mengenai sejauh mana kekuasaan publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Indikator ini mencakup berbagai bentuk korupsi, baik dalam skala kecil maupun besar, termasuk praktik *state capture* atau “penangkapan negara” oleh kelompok elit maupun kepentingan tertentu (Kaufmann et al., 2010). Millennium Challenge Corporation (MCC) mendefinisikan *control of corruption* sebagai ukuran terhadap tingkat penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan privat, yang meliputi korupsi dalam berbagai skala serta fenomena dominasi elit terhadap kebijakan negara. Selain itu, indikator ini juga mengukur kekuatan serta efektivitas kerangka kebijakan dan kelembagaan suatu negara dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan praktik korupsi.

2.2 Tinjauan Empiris

Peneliti	Judul	Hasil
Nurhayati (2025)	Governance Indicators and Sustainable Development in ASEAN	Government effectiveness, rule of law, dan control of corruption berpengaruh positif terhadap pembangunan berkelanjutan
Ahmad & Hamid (2024)	Foreign Direct Investment and Economic Growth in Southeast Asia	<i>FDI</i> memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada negara dengan kualitas institusi yang baik.
Nguyen et al. (2024)	Labor Force Participation and Economic Growth in ASEAN Economies	Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
Edy Wibowo (2013)	Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai indikator tata kelola pemerintahan, antara lain voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, serta control of corruption. government effectiveness dan rule of law terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Rahman et al. (2023)	Governance Quality and Economic Performance in Developing Countries	Kualitas tata kelola pemerintahan meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Foreign Direct Investment (FDI)*, *Labor Force Participation Rate (LFPR)*, *Government Effectiveness*, dan *Control of Corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.



gambar 6. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui data-data yang diperoleh, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga *Foreign Direct Investment* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2002-2024.
2. Diduga Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2002-2024
3. Diduga *government effectiveness* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2002-2024
4. Diduga *control of corruption* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2002-2024.
5. Diduga *Foreign Direct Investment (FDI)*, Angkatan kerja *government effectiveness*, dan *control of corruption* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara- negara ASEAN selama tahun 2002–2024

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen melalui analisis statistik. Sementara itu, penelitian digunakan untuk menjelaskan pengaruh Foreign Direct Investment (*FDI*), *Labor Force Participation Rate (LFPR)*, dan Tata Kelola Pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk data panel (panel data), yaitu gabungan antara data time series dan cross section. Data time series mencakup periode tahun 2002–2024, sedangkan data cross section terdiri atas negara-negara anggota ASEAN.

3.1.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari World Bank, yaitu data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh lembaga terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik data panel, yang merupakan kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data penampang silang (*cross section*). Data *cross section* dalam penelitian ini mencakup negara-negara di kawasan ASEAN, sedangkan data *time series* meliputi periode tahun 2002 hingga 2024. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas *foreign Direct Investment (FDI)*, *Labor Force Participation Rate (LFPR)*, *Government Effectiveness*, dan *Control of Corruption*.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan perubahan tingkat pendapatan nasional dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan nominal. Konsep ini menggambarkan dinamika perkembangan perekonomian suatu negara, yang umumnya diukur melalui *Gross Domestic Product* (GDP). GDP dianggap representatif dalam merefleksikan pertumbuhan ekonomi karena merupakan akumulasi nilai tambah akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor dalam perekonomian. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diprosikan menggunakan nilai GDP yang dinyatakan dalam satuan juta dolar Amerika Serikat untuk masing-masing negara ASEAN selama periode 2002–2024. perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$G = \left(\frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \right) \times 100\%$$

dimana:

GDP_t =GDP harga konstan tahun t

GDP_{t-1} =GDP harga konstan sebelum tahun t

(McEachern, 2001)

Semakin tinggi persentase pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi dan prospek yang positif dalam pengembangan ekonomi di masa mendatang.

2. *Foreign Direct Investment (FDI) (X₁)*

Foreign Direct Investment (FDI) (X₁) merupakan variabel yang merepresentasikan arus penanaman modal asing secara langsung dalam suatu perekonomian. Pengukuran *FDI* dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk persentase, yaitu perbandingan antara nilai arus masuk *FDI (FDI inflow)* suatu negara dalam periode satu tahun terhadap nilai *Gross Domestic Product (GDP)* tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari *World Bank*.

3. *Labor Force Participation Rate (LFPR) (X₂)*

Tingkat partisipasi angkatan kerja (*Labor Force Participation Rate/LFPR*) merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang terlibat dalam angkatan kerja (Lembaga Demografi FEUI, 2004: 206). Angkatan kerja mencakup individu berusia 15 tahun ke atas yang berperan sebagai penyedia tenaga kerja dalam kegiatan produksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Kelompok ini meliputi individu yang sedang bekerja, penganggur yang aktif mencari pekerjaan, serta mereka yang sedang berupaya memperoleh pekerjaan. Sementara itu, terdapat kelompok yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga dan pelajar.

4. indikator Tata Kelola Pemerintahan (*World Governance Indicators*)

1. *Government effectiveness (X₃)*

Government effectiveness merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan layanan publik, mutu birokrasi beserta tingkat independensinya dari intervensi politik, kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran indikator ini dilakukan menggunakan skala indeks yang berada pada rentang -2,5 hingga 2,5. Nilai -2,5 menunjukkan tingkat kinerja tata kelola pemerintahan yang paling rendah, sedangkan nilai 2,5 mencerminkan capaian tertinggi dalam penerapan prinsip *good governance* (Kaufmann, 2010).

2. *Control of Corruption (X₄)*

Control of corruption merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana kekuasaan publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk berbagai bentuk praktik korupsi. Pengukuran indikator ini juga dilakukan dengan menggunakan skala indeks yang berkisar antara -2,5 hingga 2,5. Nilai -2,5 merepresentasikan tingkat kinerja tata kelola pemerintahan yang paling rendah, sedangkan nilai 2,5 menunjukkan capaian tertinggi dalam penerapan prinsip *good governance* (Kaufmann, 2010).

3.3 Model Penelitian

Model ekonometrika yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh *FDI*, angkatan kerja, tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN yaitu:

$$Y = a_1 + a_1 FDI_{it} + a_2 LBPR_{it} + a_3 GE_{it} + a_4 CC_{it}$$

Dimana:

Y	=	Pertumbuhan Ekonomi
LBPR	=	Labor forcepartipation rate
FDI	=	Foreign Direct Investment
CC	=	Control of Corruption
GE	=	Government effectifveness
α_1	=	Koefisien
A	=	Intercept
I	=	Periode
T	=	Negara

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan bantuan perangkat lunak E-Views versi 12 sebagai alat pengolahan dan analisis data.

3.4.1 Metode Regresi Panel Data

Data panel memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan penggunaan data *time series* maupun *cross section* secara terpisah. Data panel merupakan kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data penampang silang (*cross section*) (Widarjono, 2018). Data *time series* merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti harian, bulanan, triwulanan, maupun tahunan. Sementara itu, data *cross section* adalah data yang dikumpulkan pada satu periode waktu tertentu dari berbagai unit analisis, seperti individu, perusahaan, wilayah, atau negara. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, variabel penelitian dapat diamati pada beberapa negara ASEAN (*cross section*) sekaligus dalam beberapa periode waktu (*time series*), yang kemudian disebut sebagai data panel.

Dalam analisis data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang umum digunakan, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Penggunaan data panel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan penggunaan data *time series* atau *cross section* secara terpisah, antara lain:

- a. Data panel memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi karena mencakup berbagai individu dalam beberapa periode waktu;
- b. Data panel memungkinkan estimasi karakteristik spesifik masing-masing individu berdasarkan perbedaan (heterogenitas) yang dimilikinya;
- c. Data panel menyediakan informasi yang lebih kaya dan variatif serta cenderung memiliki tingkat multikolinearitas yang lebih rendah, sehingga meningkatkan derajat kebebasan dan efisiensi estimasi;
- d. Data panel lebih sesuai untuk menganalisis perubahan yang bersifat dinamis karena merupakan data *cross section* yang diamati secara berulang.
- e. Data panel mampu mengidentifikasi serta mengukur pengaruh variabel yang tidak dapat diamati secara langsung (*unobserved variables*) yang tidak dapat ditangkap secara optimal oleh data *time series* maupun *cross section* saja;
- f. Data panel memungkinkan pengembangan model perilaku yang lebih kompleks.

Ada beberapa kemungkinan asumsi yang muncul antara lain:

5. Intersep dan slope adalah konstan menurut waktu dan individu.
6. Slope tetap, tetapi intersep berbeda antar individu.
7. Slope tetap, tetapi intersep berbeda antar waktu.
8. Semua koefisien (slope dan intersep) berbeda antar individu.
9. Semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu.

3.5 Tahap Analisis

3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar sehingga menghasilkan estimasi yang valid, tidak bias, dan dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan statistik (Ghozali, 2018).

3.5.1.1 Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas dalam model regresi digunakan untuk menilai apakah residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik mensyaratkan bahwa residual harus mengikuti distribusi normal agar hasil estimasi menjadi valid dan dapat diinterpretasikan secara tepat. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji Jarque-Bera. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah data dinyatakan berdistribusi normal berdistribusi normal apabila nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen (0,05). Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian normalitas adalah sebagai berikut:

H_0 : Residual berdistribusi normal

H_a : Residual terdistribusi normal

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Dalam regresi berganda, hubungan linier antar variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan yang sempurna (*perfect multicollinearity*) maupun tidak sempurna (*imperfect multicollinearity*). Salah satu cara yang umum digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas adalah melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF berada di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinieritas (Widarjono, 2013).

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan kondisi yang menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap asumsi klasik homoskedastisitas, yaitu ketika varians error tidak bersifat konstan untuk setiap nilai variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_p). Dalam kondisi homoskedastisitas, varians error diasumsikan sama pada setiap observasi. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, maka estimasi dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) tidak lagi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

Heteroskedastisitas dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut: $E(e_i) = \sigma^2$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode White dengan hipotesis pengambilan keputusan tertentu.

Secara matematis, kondisi heteroskedastisitas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$E(e_i^2) = \sigma_i^2$, untuk $i = 1, 2, \dots, n$, yang menunjukkan bahwa varians error berbeda pada setiap observasi.

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Metode White. Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H_0 : Nilai Prob $> \alpha$ (0,05) = Tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas

H_a : Nilai Prob $< \alpha$ (0,05) = Terjadi gejala Heteroskedastisitas

Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas (Obs*R-squared) lebih besar dari tingkat signifikansi (α), maka H_0 diterima yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari α , maka H_0 ditolak yang menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas dalam model.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, terdapat beberapa metode pengujian yang dapat digunakan, antara lain uji Durbin-Watson (Durbin-Watson Test), uji Lagrange Multiplier (LM Test), uji statistik Q, serta Run Test. Uji autokorelasi digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau korelasi antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya dalam suatu model regresi. Kondisi ini umumnya terjadi pada data runtut waktu (*time series*), di mana nilai suatu variabel pada periode tertentu dapat dipengaruhi oleh nilai pada periode sebelumnya, seperti pada data saham yang memiliki keterkaitan antar waktu. Fenomena tersebut dikenal sebagai autokorelasi. Model regresi klasik diasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar residual. Apabila asumsi ini dilanggar, maka model regresi menjadi tidak valid karena dapat menghasilkan

estimasi parameter yang bias dan tidak rasional. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, terdapat beberapa metode pengujian yang dapat digunakan, antara lain uji Durbin-Watson (*Durbin-Watson Test*), uji Lagrange Multiplier (LM Test), uji statistik Q, serta *Run Test*.

Hipotesisnya adalah:

H_0 : Model tidak mengalami masalah autokorelasi

H_a : Model mengalami masalah autokorelasi

Dengan kriteria:

Obs*R square (X^2 hitung) < *Chi-square* tabel (X^2 tabel) = Terima H_0

Obs*R square (X^2 hitung) > *Chi-square* tabel (X^2 tabel) = Terima H_a

3.5.2 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Dalam analisis dengan model data panel terdapat tiga macam metode pendekatan estimasi yang biasa dilakukan:

3.5.2.1 *Common Effect Model (CEM)*

Pendekatan paling sederhana dalam mengestimasi model data panel dilakukan dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar individu maupun antar waktu. Melalui penggabungan tersebut, estimasi dapat dilakukan menggunakan metode *Common Effect Model*. Metode ini mengasumsikan bahwa tidak terdapat perbedaan baik antar unit observasi maupun antar periode waktu, sehingga seluruh data diperlakukan secara homogen (Widarjono, 2013). Dengan demikian, pendekatan *Common Effect Model* tidak memperhitungkan dimensi individu maupun waktu dalam proses estimasi. Adapun bentuk umum dari model *Common Effect* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

X_{1it} dan X_{2it} = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

β_0 = Konstanta (intercept)

β_1 dan β_2 = Koefisien regresi

3.5.2.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Model regresi yang mengasumsikan adanya perbedaan nilai intersep dalam persamaan dikenal sebagai *Fixed Effect Model*. Pendekatan ini digunakan untuk mengestimasi data panel dengan memanfaatkan variabel dummy guna merepresentasikan perbedaan karakteristik antar unit observasi. Konsep *Fixed Effect* didasarkan pada adanya variasi intersep antar individu, sedangkan nilai intersep tersebut dianggap konstan sepanjang waktu. Selain itu, model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi bersifat tetap, baik antar perusahaan maupun antar periode waktu. Dalam praktiknya, metode estimasi ini sering disebut sebagai teknik *Least Squares Dummy Variables (LSDV)* (Widarjono, 2013).

Adapun bentuk persamaan LSDV dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_4 D_{2it} + \beta_n D_{nit} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

X_{1it} , dan X_{2it} = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

$D_1, D_2, \dots, D_n = 1$ untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0 untuk lintas individu yang tidak berpengaruh

β_0 = Konstanta (intercept) $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$ = Koefisien regresi

3.5.2.3 *Random Effect Model (REM)*

Pendekatan *Random Effect* merupakan metode estimasi data panel yang digunakan untuk mengatasi ketidakefisienan pada metode *Ordinary Least Squares (OLS)* dengan mempertimbangkan komponen error yang berasal dari dimensi *cross section* dan *time series*. Model ini merupakan pengembangan dari metode *Generalized Least Squares (GLS)* yang dirancang untuk menghasilkan estimasi yang lebih efisien. Dalam pendekatan *Random Effect*, diasumsikan bahwa efek individual yang tidak teramati (*unobserved individual effects*) tidak berkorelasi dengan variabel independen (*regressor*), sehingga komponen tersebut bersifat acak (*random*). Dengan demikian, variasi antar individu dimasukkan ke dalam

bagian error model, bukan sebagai parameter tetap yang harus diestimasi.

3.5.3 Uji Spesifikasi Model

3.5.3.1 Uji Chow

Uji spesifikasi digunakan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji Chow berfungsi untuk memilih antara model *Fixed Effect* atau model *Common Effect/Pooled Least Square* (PLS) yang lebih tepat digunakan dalam penelitian.

Adapun hipotesis yang digunakan yaitu:

H_0 : menggunakan pendekatan model *Common Effect*.

H_a : menggunakan pendekatan model *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengujian:

Menerima H_0 , jika nilai statistic redundant < f-tabel
Menolak H_0 , jika nilai statistic redundant > f-tabel

Ketika model yang terpilih adalah *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausmann untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM).

3.5.3.2 Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk menentukan model estimasi data panel yang paling tepat, yaitu antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pada pendekatan FEM, setiap unit observasi memiliki nilai intersep yang berbeda, namun intersep tersebut bersifat konstan sepanjang waktu (*time-invariant*). Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar individu dapat direpresentasikan melalui variasi intersep tanpa mengalami perubahan antar periode. Sebaliknya, pada pendekatan REM, intersep yang digunakan merupakan nilai rata-rata dari seluruh intersep pada data *cross section*, sedangkan perbedaan antar individu direpresentasikan melalui komponen error yang bersifat acak. Komponen ini mencerminkan deviasi masing-masing individu terhadap nilai rata-rata intersep tersebut.

Hipotesis dalam uji Hausman sebagai berikut :

H_0 : menggunakan pendekatan model *Random Effect Model*

H_a : menggunakan pendekatan model *Fixed Effect Model*

Dengan kriteria pengujian:

Menolak H_0 , jika nilai statistic redundant $>$ f-tabel Menerima H_0 , jika nilai statistic redundant $<$ f-tabel

Jika hipotesis H_0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai *FEM*. Karena *REM* kemungkinan berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas. Sebaliknya, apabila H_a ditolak, maka model yang sebaiknya dipakai adalah *REM*.

3.5.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Apabila pada dua pengujian sebelumnya diperoleh hasil yang menunjukkan penerimaan H_0 , baik pada salah satu maupun kedua uji tersebut, maka langkah selanjutnya adalah melakukan Uji *Lagrange Multiplier (LM)* atau yang dikenal sebagai *Breusch-Pagan Random Effect Test*. Namun, apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pengujian ini tidak perlu dilakukan. Uji *Lagrange Multiplier (LM)* digunakan untuk menentukan model estimasi data panel yang paling tepat antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk menilai apakah model dengan efek acak lebih baik dibandingkan model tanpa mempertimbangkan efek individu. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect*

H_a : Model *Random Effect*

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (α), maka H_0 diterima sehingga model yang digunakan adalah *CEM*. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α , maka H_0 ditolak dan model yang lebih tepat digunakan adalah *REM*.

3.5.4 Pengujian Hipotesis Statistik

Salah satu komponen penting dalam analisis ekonometrika adalah pengujian hipotesis. Pengujian ini berperan dalam proses penarikan kesimpulan penelitian serta digunakan untuk menilai tingkat akurasi dan keandalan data yang dianalisis. Dalam pelaksanaannya, pengujian hipotesis umumnya mencakup tiga bentuk

utama, yaitu uji signifikansi parameter secara individual (*uji t*), uji signifikansi secara simultan (*uji F*), serta pengukuran koefisien determinasi (R^2).

3.5.4.1 Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh atau hubungan masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Gujarati, 2007). Pengujian ini dilakukan terhadap koefisien regresi untuk menilai signifikansi parameter secara individual dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$; $t\text{-hitung} < -t\text{-tabel}$
 H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $t\text{-hitung} < -t\text{-tabel}$; $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

Foreign Direct Investment

$H_0: \beta_1 = 0$ *FDI* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara-negara ASEAN.

$H_a: \beta_1 > 0$ *FDI* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

Labor Force Participation Rate

$H_0: \beta_2 = 0$ *LFPR* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

$H_a: \beta_2 > 0$ *LFPR* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

Government effectiveness

$H_0: \beta_3 = 0$ *government effectiveness* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

$H_a: \beta_3 > 0$ *government effectiveness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

Control of corruption

$H_0: \beta_3 = 0$ *Control of corruption* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

$H_a: \beta_3 > 0$ *Control of corruption* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan statistik F pada tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga dapat diketahui signifikansi model secara keseluruhan. Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah:

$H_0: = 0$, seluruh variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

$H_a: \neq 0$, seluruh variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$.

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$

3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai ini menunjukkan proporsi total variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. R^2 memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sehingga model yang digunakan dinilai semakin baik. Sebaliknya, nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan penjelasan model relatif rendah. Dalam analisis regresi, juga dikenal *Adjusted R²*, yaitu koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model. Ukuran ini memberikan estimasi yang lebih akurat karena mempertimbangkan derajat kebebasan, sehingga lebih tepat digunakan dalam model yang memiliki lebih dari satu variabel independen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) terhadap 10 negara ASEAN periode 2002–2021, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Foreign Direct Investment (FDI)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. *Labor Force Participation Rate (LFPR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. *Government effectiveness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. *Control of Corruption* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Secara simultan, *FDI*, *LFPR*, *Government effectiveness*, dan *Control of Corruption* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Negara ASEAN

Pemerintah perlu terus meningkatkan daya tarik investasi asing melalui stabilitas kebijakan, kemudahan perizinan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu, reformasi birokrasi dan penguatan lembaga anti-korupsi perlu diperkuat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan kompetitif.

2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar partisipasi angkatan kerja tidak hanya tinggi secara kuantitas tetapi juga berkualitas secara produktivitas.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Efektivitas kebijakan publik harus terus ditingkatkan dengan sistem pengawasan yang baik, transparansi anggaran, dan digitalisasi layanan publik untuk mengurangi potensi penyimpangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti inflasi, ekspor, stabilitas politik, atau perkembangan teknologi untuk memperkaya model analisis. Selain itu, dapat dilakukan pengujian dengan metode lain seperti Random Effect Model atau pendekatan dynamic panel untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishing Group.
- Agustus 2023
- Aidt, Toke, Jayasri Dutta dan Vania Sena. 2008. *Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence*. *Journal of Comparative Economics* 36 (2008) 195–220.
- Alam, Rafayet, Erick Kitenge, and Bizuayehu Bedane. 2017. *Government effectiveness and Economic Growth*. *Economic Buletin*. Vol 37 issue 1.
- Aldaba, M. Rafaelita dan Josef T. Yap, 2009. *Investment and Capital Flows: Implication of the ASEAN Economic Community*. Philippine Institute for Development Studies.
- Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: The role of local financial markets. *Journal of International Economics*, 64(1), 89–112.
- Anoraga, Pandji. 1995. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ari, Ibrahim & Koc, Muamar. 2020. Economic Growth, Public and Private Investment: A Comparative Study of China and United States. *Sustainability* 12(2234): 1-19.
- Azam, Muhammad., Khan, Saleem., Zainal, binti Zalina., Karuppiah, Namasivayam., Khan, Farah. 2015. *Foreign Direct Investment and Human Capital: Evidence From Developing Countries*. *Investment Management and Financial Innovation*, 12 (3-1). Journal.
- Barro, R. J. (2015). *Economic Growth* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Bloom, D. E., & Canning, D. (2008). Population health and economic growth. Commission on Growth and Development Working

Paper, No. 24.

- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115–135.
- Dewi, Putu Kartika dan Nyoman Triaryati. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak terhadap Investasi Asing Langsung*. E- Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 4, 2015: 866-878.
- Discussion Paper No.2015-18, Kiel Institute for the World Economy. <http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2015-18>.
- Doucouliaagos, H., and Lamsiraroj, S. 2015. *Does Growth Attract FDI?*.
- Eigbiremolen, G., O & Anaduaka, U., S. 2014. Human Capital Development and Economic Growth: The Nigeria Experience. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 4(4): 25-35.
- Fayissa, B., & Nsiah, C. (2019). The impact of governance on economic growth in Africa. *Economic Modelling*, 80, 408–418.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home> diakses 17 Agustus 2023 .
- <http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 .
- <http://www.worldbank.org> diakses pada tanggal 17 Agustus 2023.
- <http://www.worldbank.org> diakses pada tanggal 20 September 2023.
- https://en.wikipedia.org/World_Governance_Index diakses pada tanggal 17 Agustus 2023.
- <https://www.economist.com/economics-a-to-z/s#node-21529341> diakses 01 September 2023
- Huynh, Kim P. dan David T. Jacho-Chávez. 2009. *Growth and Governance: A Nonparametric Analysis*. *Journal of Comparative Economics* 37 ; 121–143.

- Jhingan, ML. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Edisi 1 cetakanke-10. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Kaufman, Daniel, Aart Kraay dan Pablo Zoido- Lobatón. 2009. *Governance Matters II – Update Indicators for 2000/01*. World Bank Policy Research Working Paper No. 2772, Washington, D.C.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. World Bank Policy Research Working Paper, No. 5430.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. 2005. *Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004*. World Bank Policy Research Working Paper No. 3630. Washington, D.C.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. 2010. *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*. Global Economy and Development. Brookings Institution.
- Krugman R. Paul dan Maurice Obsfeld. 1999. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42.
- Lucas, R. E. 1988. On The Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics* 22(1): 3-42.
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (10th ed.). New York: Worth Publishers.
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712.
- Méon, P. G., & Sekkat, K. (2005). Does corruption grease or sand the wheels of growth? *Public Choice*, 122(1–2), 69–97.
- Mincer, J. 1996. Economic Development, Growth of Human Capital, and The Dynamics of The Wage Structure. *Journal of Economic Growth* 1(1): 29–48.
- Nguyen, C. P., Du, J., & Nguyen, T. V. (2020). Foreign direct investment and economic growth in Southeast Asia. *Journal of*

- Asian Economics, 69, 101254.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Plummer, M., 2007. *Completing the AIA Road Traveled, Road Ahead*. Project of the East- West Center for the ASEAN Secretariat.
- Riyad, Mohammad. 2012. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Enam Negara ASEAN tahun 1990-2009*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Romer, P. 2007. *Endogenous Technical Change*. Journal of Political Economy. 98(5): S71-102.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 2004. Edisi Tujuh Belas. *Ilmu Makro-ekonomi*. Edisi Tujuh Belas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka.
- T. T. Hoang, P. Wiboonthukula and B. Tubtimong. 2010. "Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth in Vietnam?" ASEAN Economic Bulletin, Vol. 27, No. 3, 2010, p. 295. doi:10.1355/ae27-3d.
- Todaro, P. Michael dan Smith, C. Stephen. 2006. *Economic Development, 9th Edition*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- UNDP (2008). *A Users' Guide to Measuring Corruption*. <http://www.globalintegrity.org/information/books>.
- Utami, Esti Margiyanti. 2015. Human Capital dan Social Capital Untuk Memenangkan Persaingan di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Segmen Jurna Manajemen dan Bisnis Edisi Khusus Era MEA* 11(3):1-16.
- Wibowo, Edy. 2013. *Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang

- Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews edisi keempat*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- World Bank. (2022). *Worldwide Governance Indicators*. Washington, DC: World Bank.
- Yu, Weiqiu. 2015. Human Capital, Social Capital and Economic Growth. *Athens Journal of Social Sciences* 2(3): 161-172.
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of economic growth* (Vol. 1A, pp. 385–472). Elsevier.
- ASEAN Secretariat. (2024). *ASEAN key figures 2024*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2024). *ASEAN statistical yearbook 2024*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat, & United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *ASEAN investment report 2024*. ASEAN Secretariat.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer.
- Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson.
- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115–135. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(97\)00033-0](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00033-0)
- Busse, M., & Hefeker, C. (2007). Political risk, institutions and foreign direct investment. *European Journal of Political Economy*, 23(2), 397–415. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.02.003>
- Dunning, J. H. (1993). *Multinational enterprises and the global economy*. Addison-Wesley.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2017). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- International Labour Organization. (2024). *ILOSTAT database*.
<https://ilostat.ilo.org>
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Rajawali Pers.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2024). *Worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues*. World Bank Group.
- Kharisma, B. (2025). Foreign direct investment, institutional quality and economic growth in ASEAN countries. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 26(1), 1–20.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437. <https://doi.org/10.2307/2118477>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Economic outlook for Southeast Asia, China and India 2024*. OECD Publishing.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.
<https://doi.org/10.1086/261725>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2019). *Economics* (20th ed.). McGraw-Hill Education.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
<https://doi.org/10.2307/1884513>
- Sukirno, S. (2021). *Makroekonomi teori pengantar* (edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (14th ed.). Pearson.

- United Nations Conference on Trade and Development. (2021). *World investment report 2021: Investing in sustainable recovery*. United Nations.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *World investment report 2024*. United Nations.
- World Bank. (2025). *Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)*. World Development Indicators. <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS>
- World Bank. (2025). *GDP growth (annual %)*. World Development Indicators. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>
- World Bank. (2025). *Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)*. World Development Indicators. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.ZS>
- World Bank. (2025). *Worldwide governance indicators*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi>
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach* (7th ed.). Cengage Learning.
- World Economic Forum. (2024). *Future of jobs report 2024*. World Economic Forum.